

LAPORAN TAHUNAN



PT.BPR DANAPOS

JL. KH.Abdullah Bin Nuh No.18-18 Cianjur 43211
Phone : 0263-280588 (hunting) fak 0263-280599

TAHUN 2025

Laporan Absensi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelaporan

Wajib Laporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Ya

Periode Data

Status Submit Laporan

2025-12-31

Semua

No	Sandi LJK	Nama LJK	Periode Data	Wajib Laporan	Status Submit Laporan	Tgl Upload (R)	Tgl Upload (K)	Tgl Batas Akhir (R)	Mulai Validasi Server	Selesai Validasi Server	Hasil Validasi Server	Keterangan	Versi Upload
1	601889	PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos	2025-12-31	Ya	Lapor	2026-01-29 10:01:21		2026-04-30 23:59:59	2026-01-29 10:13:53	2026-01-29 10:13:55	Sukses		2

Laporan Absensi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelaporan	Wajib Laporan
Laporan Tahunan Bank Persekonomian Rakyat	Ya
Periode Data	Status Submit Laporan
2025-12-31	Semua

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

1040155-2-LTBPRK-R-A-20251231-010201-601889-29012026100121

Periode Data

2025

User ID Petugas Pelaporan

hermanto@bprdanapos.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-01-29 10:01:21



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



LAPORAN BPK/BRP3 & LAPORAN TUNTUNAN BANK PEREKONOMIAN RACCAT

Herrardo
Administrator | 02 Laporan Tuntunan BPK/BRP3

Home

📄 **Laporan**

- 📄 Absensi
- 📄 Upload
- 📄 Reports
- 📄 Basic

- 🔧 Administrasi
- 🔍 Audit Log
- 📄 Support dan Download
- 📄 Korrespondensi

01201-01183

https://apollo-0jk.go.id/ReportL1BRK

🖨️ **Print**

01201-01183

https://apollo-0jk.go.id/ReportL1BRK

Form A.01.01
Data Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Alamat	Jabatan	Tanggal Mulai Menjabat	Tanggal Selesai Menjabat	Surat Persetujuan		Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja
					No. SK	Tanggal SK		
H. DADANG RACHMAT, SE, MSI	KP. KALAPA DUA RT 003 RW 003 DESA SINDANGLAYA KECAMATAN CIPANAS CIANJUR	210	04-03-2022	03-03-2027	S-198/KR.0211/2021	31-12-2021	Ya	12-04-2027
MUHAMMAD ALI	JL. BINAWAN IX BLOK A1 NO. 8 BELKA RESIDENCE RT 001 RW 015 DS. LMBANGANSARI KEC. CIANJUR	110	04-03-2022	03-03-2027	S-198/KR.0211/2021	31-12-2021	Ya	22-10-2027
KENNY RAHMAT	JL. LAMANDAU RAYA NO. 8 RT. 006 RW. 007 KELURAHAN KRAMAT PELA KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN	220	28-04-2025	27-04-2030	SR-17/KO.122/2025	30-01-2025	Ya	30-12-2027
YAYAT SURYATNA	BUKIT KALIMAYA INDAH BLOK A1 JALAN TULIP NO. 1 RT. 003 RW.019 KELURAHAN BOJONGHERANG CIANJUR	120	28-04-2025	27-04-2030	SR-17/KO.122/2025	30-01-2025	Ya	30-12-2027

Form A.01.01
Data Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : **PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos**

Posisi Laporan : **Desember 2025**

Pendidikan Terakhir	Tanggal Kelulusan	Nama Lembaga	Pendidikan Non Formal				Keanggotaan Komite					Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Komisaris Independen
			Jenis Pelatihan Terakhir	Tanggal Pelatihan	Lembaga Penyelenggara	Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko				
02	25-09-2004	UNIVERSITAS LANGGLANGBUANA	SERTIFIKASI	13-01-2022	LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO	01	01	01				2	2
03	12-07-2016	STIE PASIMI SUKABUMI	SERTIFIKASI	03-09-2024	LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI CERTIF						01	2	
03	19-03-2014	UNIVERSITAS BINA NUSANTARA	SERTIFIKASI	30-12-2024	LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI CERTIF	02	02	02				2	2
03	24-06-2006	UNIVERSITAS SURYAKANCANA CIANJUR	SERTIFIKASI	30-12-2024	LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI CERTIF						02	1	

Form A.01.02
Data Pejabat Eksekutif BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Pejabat Eksekutif	Alamat	Jabatan					Tanggal Mulai Menjabat	Surat Pengangkatan	
		Kepatuhan	Manajemen Risiko	Audit Intern	APU dan PPT	Lainnya		No	Tanggal
RITA MARIA	KAMPUNG PACET RT 03 RW 05 DESA CIPENDAWA KEC PACET	02	02	01	00	00	25-11-2015	20151125	25-11-2015
WINA NENGSIH	KP WARUNG JAMBE RT 04 RW 06 DESA SUKAMANAH KEC KARANGTENGAH	00	00	00	00	01	25-11-2015	20151125	25-11-2015
HERMANTO	KP DAMAR INDAH RT 005 RW 003 DESA CIPENDAWA KEC PACET	00	00	00	00	01	15-07-2019	20190715	15-07-2019
YANTI SUSANTI	KP LOA SARI RT 01 RW 09 DS KAWUNGLUWUK KEC SUKARESMI	00	00	00	02	01	18-06-2019	20190618	18-06-2019

Form A.01.02
Data Pejabat Eksekutif BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Keanggotaan Komite			
Komite Audit	Komite Pemantauan Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko
00	00	00	00
00	00	00	00
00	00	00	00
00	00	00	00

Form A.02.00
Data Kepemilikan BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Pemegang Saham							Ultimate Shareholders
Nama	Alamat	Jenis	Status Pemegang Saham	Jumlah Nominal	Persentase Kepemilikan		
RAHMAT	JL. SRIWIJAYA RAYA NO. 38B RT 004 RW 001 KEL. SELONG KEC. KEBAYORAN BARU	01	01	9.200.000.000	96,84		
DADANG RACHMAT	KP. KALAPA DUA RT 003 RW 003 DS SINDANGLAYA KEC. CIPANAS	01	02	300.000.000	3,16		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Informasi	Keterangan
Nomor akta pendirian	103
Tanggal akta pendirian	25-04-1994
Nomor perubahan anggaran dasar terakhir	01
Tanggal perubahan anggaran dasar terakhir	02-05-2025
Nomor pengesahan dari instansi yang berwenang	AHU-AH.01.09-0220358
Tanggal pengesahan dari instansi yang berwenang	05-05-2025
Tanggal mulai pelaksanaan kegiatan usaha	19-12-1994
Bidang usaha sesuai anggaran dasar	JASA KEUANGAN
Tempat kedudukan	CIANJUR

Pada tahun buku 2025 PT. BPR DanaPos dengan total aset dibawah 10 M, tidak menggunakan jasa AP/KAP

Form A.03.02
Ikhtisar Data Keuangan Penting

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Rekening	Jumlah
Pendapatan Operasional	1.442.790.088
Beban Operasional	1.607.395.669
Pendapatan Non Operasional	2.503.017
Beban Non Operasional	120.397
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	(162.222.961)
Taksiran Pajak Penghasilan	0
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(106.609.387)

Form A.03.03
Laporan Kualitas Aset Produktif



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Aset	Posisi Tanggal Laporan						Macet	Jumlah
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan				
Surat Berharga	0	0	0	0	0	0	0	
Penempatan pada bank lain	743.368.592		0		0	0	743.368.592	
Kredit yang diberikan								
a. Kepada BPR	0	0	0	0	0	0	0	
b. Kepada Bank Umum	0	0	0	0	0	0	0	
c. Kepada non bank - pihak terkait	156.218.890	0	0	0	0	0	156.218.890	
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait	6.935.240.081	48.030.472	114.452.473	26.341.376	189.327.411	0	7.313.391.813	
Penyetaraan Modal	0	0	0	0	0	0	0	
Jumlah Aset Produktif	7.834.827.563	48.030.472	114.452.473	26.341.376	189.327.411	0	8.212.979.295	

Rasio Keuangan	Niali Rasio (%)
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	80,61
Rasio Cadangan terhadap PPKA	100,00
Non Performing Loan (NPL) Neto	1,79
Non Performing Loan (NPL) Gross	4,42

Form A.03.03
Laporan Kualitas Aset Produktif

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Rasio Keuangan	Nilai Rasio (%)
Return on Assets (ROA)	-1,82
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPPO)	111,41
Net Interest Margin (NIM)	15,92
Loan to Deposit Ratio (LDR)	337,67
Cash Ratio	34,94

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Kategori	Uraian
Penyebab Utama	Penyebab NPL sebagian besar untuk kredit karyawan dikarenakan adanya mutasi ke dinas atau instansi lain, debitur resign dan ada debitur yang diberhentikan, untuk pinjaman modal kerja dikarenakan usaha debitur masih terdampak covid-19 dan gempa bumi yang terjadi di kabupaten Cianjur, sampai saat ini kondisi ekonomi belum pulih
Langkah Penyelesaian	Terus diupayakan penagihan baik melalui telepon ataupun langsung ke tempat kerja terakhir atau ke rumah debitur, serta dilakukan restrukturisasi kepada debitur-debitur yang masih memiliki kemampuan bayar

NPL BPR Danapos pada akhir Desember 2025 sebesar 4,42 % dengan predikat sehat

PERKEMBANGAN USAHA YANG BERPENGARUH SECARA SIGNIFIKAN DAN PERUBAHAN PENTING LAIN

Nama BPR : PT. BPR DANA POS

Posisi Laporan: 2025

Perkembangan yang terjadi pada periode posisi laporan adalah sebagai berikut:

A. Perkembangan Usaha yang Berpengaruh Secara Signifikan

Bidang usaha PT. BPR DanaPos sesuai anggaran dasar yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito Berjangka, dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman. Penyaluran kredit masih kepada Karyawan RSUD Bunut, Karyawan KSP Nusantara dan kredit kepada Pensiun. Pada tahun 2025 BPR DanaPos mencatatkan peningkatan penempatan dana pihak ketiga dalam bentuk deposito. Meningkatnya penempatan deposito memberikan dampak positif bagi BPR, khususnya dalam memperkuat pendanaan dan meningkatkan kemampuan penyaluran kredit. Kepercayaan nasabah terhadap BPR DanaPos menjadi modal penting bagi BPR untuk mendorong pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan dimasa yang akan datang.

<i>Keterangan</i>	<i>Target 2025</i>	<i>2025</i>	<i>2024</i>	<i>Pencapaian dibanding target</i>	<i>Pencapaian dibanding tahun sebelumnya</i>
<i>Asset</i>	21.371.175.866	9.335.348.924	8.908.930.591	44%	105%
<i>Kredit</i>	19.280.918.363	7.469.610.703	6.768.457.268	39%	110%
<i>Tabungan</i>	1.488.465.895	1.048.634.921	1.488.465.897	70%	70%
<i>Deposito</i>	12.279.368.311	1.163.452.702	208.500.000	9%	558%

B. Perubahan Penting Lainnya

Perubahan Penting lainnya yaitu telah dipenuhi susunan Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta mencerminkan komitmen PT. BPR Dana Pos dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, sesuai surat persetujuan OJK dengan nomor KEP-33/KO.12/2025 tentang hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sdr. Yayat Suryatna selaku calon anggota direksi PT. BPR Dana Pos dan nomor KEP-34/KO.12/2025 tentang hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sdr. Kenny Rahmat selaku calon anggota dewan komisaris PT. BPR Dana Pos.

Sejak diberlakukannya **Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP)** dengan nomor 21/SEOJK.03/2024 tentang Panduan Akuntansi BPR, BPR telah melakukan penyesuaian kebijakan akuntansi guna memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan dilakukan secara andal dan sesuai dengan standar yang berlaku. Penerapan SAK-EP mendorong BPR untuk menerapkan prinsip kehati-hatian yang lebih kuat, khususnya dalam pengakuan penurunan nilai aset keuangan.

Dalam rangka memenuhi ketentuan regulator serta meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko dan pelaporan keuangan, **BPR telah melakukan kerja sama dengan vendor penyedia sistem teknologi informasi** untuk melakukan **upgrade dan pengembangan system**, dengan perjanjian nomor 078/36/PKS-NBP-BPR-DP/X/2025 tentang upgrade aplikasi NBP SYS 5.0, jasa pemeliharaan (maintenance) Teknologi system Informasi (TSI) terbatas pada aplikasi NBP SYS 5.0.

Upgrade sistem tersebut dirancang untuk memastikan proses perhitungan dilakukan secara lebih akurat, andal, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal pengelompokan kualitas aset, perhitungan estimasi kerugian, serta penyajian data yang terintegrasi dengan sistem pelaporan keuangan BPR. Melalui kerja sama ini, BPR juga memastikan adanya peningkatan otomatisasi proses, penguatan pengendalian internal, serta ketersediaan data yang memadai untuk kebutuhan audit dan pengawasan.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN

Nama BPR : PT. BPR DANA POS

Posisi Laporan : 2025

Dalam menjalankan kegiatan usaha PT BPR Dana Pos, manajemen membuat dan melaksanakan strategi dan kebijakan diantaranya sebagai berikut:

a. Strategi Pengembangan Bisnis

Pengembangan sistem pengelolaan penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap semua sektor kredit, yang dijalankan dengan melakukan kerjasama baik dengan juru bayar untuk melakukan pemotongan gaji/pensiun maupun kerjasama dengan pihak Bank Umum/pihak lainnya yang ditunjuk/bekerjasama dengan pihak yang melakukan pemotongan gaji sebagai Payroll bagi pegawai/karyawan yang menerima kredit dari PT. BPR Danapos sehingga pembayaran angsuran kredit berjalan lancar, dengan menerapkan strategi :

Strategi Jangka Pendek

Pencairan kredit masih di segmen potong gaji dengan penyaluran kepada karyawan Koperasi Nusantara dan RSUD Bunut serta pemberian kredit kepada pensiun secara channeling, dengan skema pembayaran angsuran dari potong gaji oleh bendahara atau mitra kerja. Penghimpunan dana dari pihak ketiga untuk penyaluran kredit.

Strategi Jangka Menengah

Melakukan ekspansi bisnis dan penyaluran kredit di Kabupaten Cianjur dan Sukabumi, kembali melakukan penghimpunan dana pihak ketiga baik tabungan dan deposito, serta pemenuhan SDM dan pemenuhan kekurangan pengurus.

b. Penguatan Permodalan :

Merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan keuangan dan stabilitas BPR, dengan berusaha mempertahankan modal inti minimum sebesar Rp6 miliar, dengan terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan dan efisiensi biaya. Pada akhir Desember 2025 Modal inti PT. BPR DanaPos sebesar Rp6.133.416.062,- (Enam miliar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu enam puluh dua rupiah) telah sesuai dengan POJK Nomor 5/POJK.03/2015 dan nomor 2/SEOJK.03/2025 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR.

c. ***Strategi untuk Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko dan Tata Kelola yaitu :***

1. Risiko kredit

Pengendalian risiko kredit dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan selalu memperhatikan rasio Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR), melakukan pemantauan portofolio kredit secara berkala dan memastikan kualitas asset terjaga dan risiko kredit dapat dikelola secara prudent

2. Risiko likuiditas

Pengendalian risiko likuiditas, dengan terus memperhatikan likuiditas bank atas Kas dan Penempatan pada Bank Lain dengan kewajiban segera dan dana pihak ketiga agar tetap pada rasio diatas 5% dan tidak terjadi gagal bayar.

3. Risiko Pasar

Pengendalian risiko pasar, dengan terus memperhatikan pasar atas tingkat suku bunga bank yang bersaing tetapi tidak merugikan bank.

4. Risiko Operasional

Pengendalian risiko operasional, dengan berupaya terus untuk meminimalisir risiko operasional yang disebabkan oleh manusia, proses, sistem dan faktor eksternal dengan terus melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan.

5. Risiko Kepatuhan

Pengendalian Risiko Kepatuhan dengan terus memperhatikan kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain termasuk risiko akibat kelemahan aspek hukum.

6. Penguatan Peran dan Tanggung Jawab Organ Tata Kelola

BPR memastikan Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawab secara independen, profesional, dan sesuai ketentuan, termasuk dalam pengawasan penerapan manajemen risiko.

7. Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

BPR menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan.

8. Penguatan Fungsi Kepatuhan dan Audit Internal

Fungsi kepatuhan dan audit internal diperkuat untuk memastikan seluruh kegiatan usaha BPR telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan internal.

9. Peningkatan Pengendalian Internal

BPR menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai untuk meminimalkan potensi penyimpangan, kesalahan, dan fraud dalam kegiatan operasional.

10. Pengelolaan Benturan Kepentingan

BPR menerapkan kebijakan dan prosedur untuk mencegah dan mengelola benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan, guna menjaga independensi dan integritas perusahaan

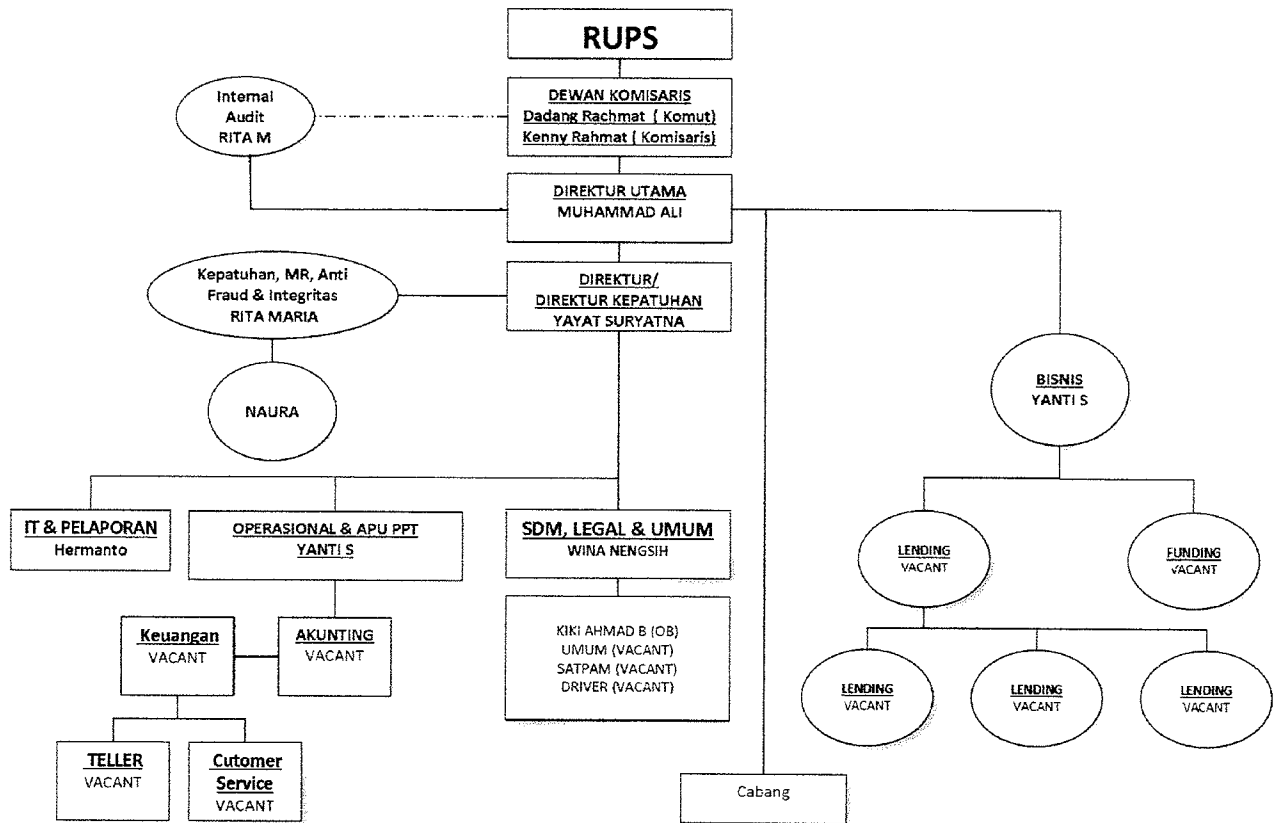
D. *Strategi Pemasaran yaitu :*

Meningkatkan kualitas layanan untuk meningkatkan kepuasan nasabah serta Mengoptimalkan Customer Relationship Management (CRM) untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah. Terus mengoptimalkan kemitraan dengan instansi/perusahaan yang telah bekerjasama.

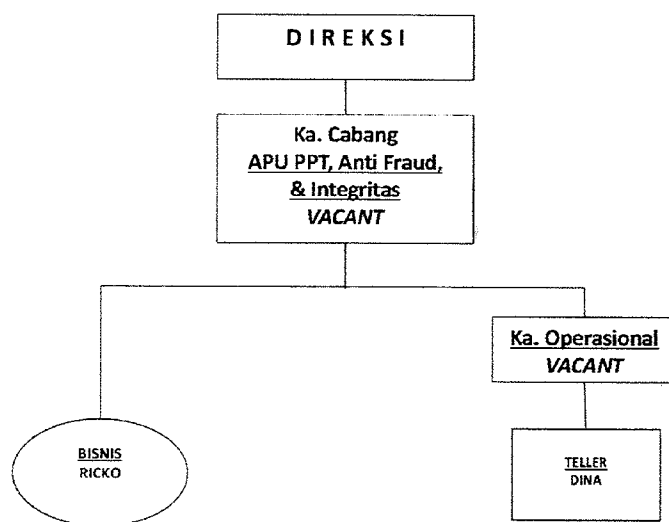
E. *Arah Kebijakan dalam Penguatan usaha BPR yaitu :*

Menyesuaikan Pedoman, SOP, SK Direksi dan ketentuan lainnya disesuaikan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Otoritas lain yang berlaku bagi BPR, serta telah melengkapi syarat administrasi untuk pemenuhan kekurangan pengurus baik untuk Direktur maupun Komisaris.

STRUKTUR ORGANISASI PT. BPR DANAPOS



Struktur Organisasi Kantor Pusat Cianjur



Struktur Organisasi Kantor Cabang Sukabumi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Kategori Kegiatan Usaha	Jenis Produk	Nama Produk	Uraian
01	01	TABUNGAN DANA PLUS	SEJAK AWAL
02	01	KREDIT PNS	2002
02	01	KREDIT KARYAWAN	SEJAK AWAL
02	01	KREDIT MODAL KERJA	SEJAK AWAL
02	01	KREDIT PENSIIUN	2004
02	01	KREDIT KARYAWAN SWASTA	2016
02	01	KREDIT MULTI DANA HAJI	2016
02	01	KREDIT CHANNELING PENSIIUN	2024

Bidang usaha BPR merupakan produk utama BPR dansebagian telah bertahan sejak awal

TEKNOLOGI INFORMASI

Nama BPR : PT. BPR DANA POS

Posisi Laporan : 2025

Penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI) BPR Dana Pos mengikuti prinsip *proportionality* (sesuai skala usaha), *interoperabilitas* (kemampuan terhubung), *sustainability* (keberlanjutan sistem), dan *compliance* (kepatuhan regulasi). Penyelenggaraan atau Sistem Operasional TI yang efektif akan mendukung efisiensi operasional, pengelolaan risiko, pengalaman nasabah, dan pertumbuhan bisnis.

Informasi mengenai penggunaan teknologi informasi pada periode posisi laporan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

A. Sistem Operasional

Sistem Operasional IT BPR Danapos memegang peran penting dalam mendukung kegiatan perbankan, mulai dari transaksi harian, pengelolaan data nasabah, hingga pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun pihak eksternal lainnya. Sistem IT BPR juga harus tetap andal dan memenuhi regulasi dari OJK serta Bank Indonesia (BI).

Secara umum, Sistem Operasional IT BPR Danapos mencakup berbagai aspek yang mendukung efisiensi dan efektivitas operasional bank. Berikut adalah gambaran umum komponen dan praktik utamanya:

1. Infrastruktur IT BPR

BPR Danapos menggunakan infrastruktur IT yang lebih sederhana tetapi tetap harus memenuhi standar keamanan dan keandalan, infrastruktur berbasis *on-premise* dengan beberapa komponen utama berikut:

- **Server dan Jaringan:**
Menggunakan server lokal untuk menyimpan data dan aplikasi perbankan, serta jaringan antar kantor terkoneksi melalui *Virtual Private Network (VPN)* menggunakan layanan *vendor* pihak ketiga yang berkualitas. Sistem dilengkapi dengan backup dan recovery untuk memastikan ketersediaan data.
- **Hardware dan Software:**
Meliputi komputer, printer, scanner, dan perangkat pendukung operasional lainnya.
- **Keamanan IT:**
Dilengkapi firewall, antivirus, sistem enkripsi, dan perlindungan lainnya untuk menjaga keamanan data internal perusahaan maupun data nasabah. Dengan pendekatan tersebut BPR Danapos dapat menjaga efisiensi biaya tanpa mengorbankan keandalan dan keamanan sistem.

2. Core Banking System (CBS)

CBS merupakan jantung dari operasional BPR Danapos, yang dirancang khusus dan berfungsi sebagai inti sistem operasional IT yang mendukung berbagai layanan perbankan. Sistem yang digunakan memungkinkan integrasi data antara kantor pusat dan cabang,

memudahkan transaksi nasabah di seluruh jaringan. Fitur-fitur utama CBS BPR antara lain:

- Manajemen Rekening
 - Pembukaan rekening
 - Pencatatan saldo tabungan dan deposito
 - Perhitungan bunga otomatis
- Layanan Kredit/Pinjaman
 - Proses pengajuan kredit
 - Persetujuan (*approval*) pinjaman
 - Pelunasan kredit
 - Pembayaran angsuran
- Operasional Keuangan
 - Jurnal akuntansi otomatis
 - Pembukuan terintegrasi
 - Transaksi multi-cabang
 - Pelaporan keuangan ke OJK
- Layanan Digital (dalam tahap perencanaan)
 - Akan mulai melakukan kerjasama dalam penyaluran kredit secara P2P Lending

CBS yang digunakan oleh BPR Dana Pos dirancang (dengan bantuan *vendor* pihak ketiga) yaitu bekerjasama dengan NBP Sys, untuk memberikan efisiensi operasional sambil tetap memenuhi kebutuhan khusus bank, dan mulai berencana serta mengembangkan layanan digital untuk meningkatkan aksesibilitas bagi nasabah.

3. Integrasi Sistem dan Kepatuhan Regulasi

- a. Integrasi dengan Sistem Eksternal
- Integrasi dengan OJK untuk pelaporan reguler termasuk:
- Laporan Berkala
 - Laporan Keuangan
 - Laporan Kredit

Selain membangun sistem terintegrasi dengan OJK, BPR Danapos juga menyelaraskan platform teknologinya dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan sistem perpajakan nasional melalui Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari komitmen guna memenuhi seluruh kewajiban institusional.

- b. Sistem Pelaporan dan Kepatuhan
- I. Mekanisme Pelaporan:
- Dilakukan secara rutin ke OJK, LPS, Dirjen Pajak, maupun pihak otoritas lainnya.
 - Dapat berbasis Excel atau terintegrasi langsung dari CBS. *Core Banking System* yang digunakan BPR Danapos telah memenuhi standar OJK.
 - Cakupan pelaporan meliputi laporan bulanan, pengelolaan data debitur, dan penilaian tingkat kesehatan bank.
- II. Aspek Kepatuhan dan pemenuhan regulasi OJK maupun regulator lain.

- c. Manajemen Data dan Regulasi
Penyediaan laporan otomatis melalui CBS untuk memastikan:
- Ketepatan waktu pelaporan
 - Kesesuaian dengan standar regulasi
 - Kemudahan dalam proses pemeriksaan (audit)

Sistem dirancang untuk memastikan BPR Dana Pos dapat memenuhi semua kewajiban regulasi, pengembangan aplikasi core banking system (CBS) dan upgrade system NBP SYS 5.0 terkait Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sesuai standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat untuk menjaga integrasi yang lancar dengan berbagai sistem eksternal yang diperlukan.

B. Sistem Keamanan

Pengamanan Fisik :

Langkah-langkah yang diambil dalam pengamanan fisik untuk melindungi perangkat keras dan perangkat lunak yaitu :

1. Perangkat keras sesuai standar.
2. Server ditempatkan pada ruangan khusus yang terkunci, sehingga dapat mencegah akses tidak sah ke perangkat keras.
3. Telah dipasang alarm kebakaran pada ruang server, saat ini dalam kondisi tidak berfungsi, perlu perbaikan.
4. Telah dipasang AC sehingga suhu ruang tetap terjaga

Pengamanan Sistem :

Langkah-langkah yang diambil dalam pengamanan sistem untuk melindungi perangkat lunak yaitu :

- a. Pengelolaan Risiko Operasional
Sistem operasional IT BPR Danapos mencakup kerangka komprehensif untuk pengelolaan risiko operasional, dengan fokus pada pencegahan penipuan atau *fraud*, pengamanan transaksi keuangan, identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko operasional teknologi informasi.
- b. Sistem Keamanan Informasi
BPR menerapkan sistem keamanan berlapis yang meliputi:
 - i. Perlindungan Jaringan:
 - Firewall yang dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
 - Perlindungan antivirus maupun malware yang selalu diperbarui.
 - ii. Manajemen Akses:
 - *Role-Based Access Control*
 - Pembatasan hak akses berdasarkan jabatan dan hak akses user sesuai prosedur sehingga meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pemakaian user di dalam sistem
 - Audit trail aktif untuk pelacakan aktivitas

- c. Proteksi Data dan Kontinuitas Bisnis
 - i. Keamanan Data:
 - Enkripsi data untuk informasi nasabah
 - Penyimpanan data terenkripsi
 - ii. Backup dan Pemulihan:
 - Backup data harian terjadwal
 - *Disaster recovery* yang terencana
 - Penyimpanan backup di lokasi aman
 - iii. Pemantauan Sistem:
 - Pemeriksaan rutin keamanan sistem
 - Evaluasi kesesuaian dengan standar regulasi

Implementasi terpadu dirancang untuk saling melengkapi, dimana sistem keamanan informasi mendukung pengelolaan risiko operasional, sementara prosedur backup dan audit menjamin kontinuitas bisnis dan kepatuhan regulasi.

C. Penyedia Jasa Teknologi Informasi

Penyedia Jasa Teknologi Informasi PT. BPR DanaPos bekerjasama dengan NBPSys untuk upgrade system dengan perjanjian kerjasama yang ditandatangani kedua belah pihak dengan nomor perjanjian 078/36/PKS-NBP-BPR-DP/X/2025 pada tanggal 17 Oktober 2025, untuk pengembangan system sesuai dengan regulasi yang saat ini berlaku untuk BPR yaitu penerapan SAK-EP.

- a. Dalam mengoptimalkan sistem *core banking*, BPR Danapos menjalin kemitraan strategis dengan vendor teknologi terpercaya untuk:
 - Implementasi sistem perbankan inti (*Core Banking System*)
 - Pemeliharaan dan pengembangan sistem berkelanjutan
 - Dukungan teknis dan penyelesaian masalah
- b. Kemitraan antara BPR dan pihak ketiga terutama disebabkan oleh:
 - Keterbatasan sumber daya SDM IT internal
 - Kebutuhan akan keahlian khusus di bidang teknologi perbankan
 - Efisiensi biaya operasional teknologi
 - Akses terhadap solusi yang sudah teruji dan sesuai regulasi
- c. Kerja sama memungkinkan BPR untuk:
 - Fokus pada bisnis inti perbankan
 - Memanfaatkan keahlian vendor yang sudah berpengalaman
 - Mengadopsi teknologi terkini dengan risiko lebih terkendali
 - Memenuhi standar keamanan dan kepatuhan yang ditetapkan regulator

PERKEMBANGAN USAHA & TARGET PASAR

Nama BPR : BPR DANA POS

Posisi Laporan : 2025

Informasi mengenai perkembangan usaha dan target pasar pada periode posisi laporan adalah sebagai berikut:

A. Perkembangan Usaha

1. Volume usaha BPR dilihat dari total asset meningkat 5% pada tahun 2025, yaitu dari Rp9.335.348.924,- dibanding tahun 2024 sebesar Rp8.908.930.591,-. Pencapaian dari target sebesar 44 %.
- 2.

Perkembangan

<i>Keterangan</i>	<i>Target 2025</i>	<i>2025</i>	<i>2024</i>	<i>Pencapaian dibanding target</i>	<i>Pencapaian dibanding tahun sebelumnya</i>
<i>Asset</i>	21,371,175,866	9,335,348,924	8,908,930,591	44%	105%
<i>Kredit</i>	19,280,918,363	7,469,610,703	6,768,457,268	39%	110%
<i>Tabungan</i>	1,488,465,895	1,048,634,921	1,488,465,897	70%	70%
<i>Deposito</i>	12,279,368,311	1,163,452,702	208,500,000	9%	558%

3. Penyaluran kredit meningkat 10% bila dibandingkan dengan tahun 2024, yaitu Rp7.469.610.703,- pada tahun 2025 dari tahun sebelumnya pada tahun 2024 sebesar Rp6.768.457.268,-. Pencapaian dari target sebesar 39%.
4. Penghimpunan dana Deposito meningkat 458% bila dibandingkan dengan tahun 2024, yaitu Rp1.163.452.702,- pada tahun 2025 dari tahun sebelumnya sebesar Rp208.500.000,- pada tahun 2024. Pencapaian dari target sebesar 9%.

5. Penghimpunan dana Tabungan menurun, hanya tercapai 30% dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp1.048.634.921,- pada tahun 2025 dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.488.465.897,- pada tahun 2024. Pencapaian dari target sebesar 70%.

B. Target Pasar

1. Target pasar penyaluran kredit, antara lain:
Target pasar BPR DanaPsos masih pada Karyawan RSUD R. Syamsudin, S.H, dan Karyawan KSP Nusantara dan para pensiun yang berkantor bayar di kantor Pos.
2. Target pasar penghimpun dana dalam bentuk tabungan, antara lain:
Seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Cianjur dan Sukabumi dan seluruh nasabah kredit wajib menjadi penabung, dikarenakan sebagai sarana pencairan dan pembayaran angsuran.
3. Target pasar penghimpunan dana dalam bentuk deposito, antara lain:
Seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur dan Sukabumi.

Form A.05.05
Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Persekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Sandi Kantor	Nama Kantor	Koordinat Kantor	Alamat Kantor				Nama Pimpinan	No. Telp
			Nama Jalan dan No.	Desa/Kecamatan	Kab/Kota	Kode Pos		
001	KANTOR PUSAT CIANJUR	-6.816550, 107.130270	JL. K.H. ABDULLAH BIN NUH NO 18 -19	PAMOYANAN CIANJUR	0110	43211	MUHAMMAD ALI	0263-280588
002	KANTOR CABANG SUKABUMI	-6.916824, 106.930914	JL. SURYAKENCANA NO. 48	CIKOLE CIKOLE	0193	43113	MUHAMMAD ALI	0266-6223032

Form A.05.05
Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Aplikasi Pelaporan Online UJK (APOLU)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : **PT Bank Persekonomian Rakyat Dana Pos**

Posisi Laporan : **Desember 2025**

Jumlah Pegawai														Jumlah Kantor Kas	Status Kepemilikan Gedung	Jumlah Kas Mobil/Kas Terapung	Jumlah EDC		
Pegawai Tetap					Pegawai Tidak Tetap					EDC Milik Sendiri	EDC Milik BU	EDC Milik BPR Lain							
S3	S2	S1	D3	SLTA	Lainnya	S3	S2	S1	D3				SLTA	Lainnya					
0	0	2	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0				

Form A.05.05
Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : **PT Bank Persekonomian Rakyat Dana Pos**

Posisi Laporan : **Desember 2025**

ATM	Perubahan Selama Bulan Posisi Laporan		Keterangan Data Kantor		Persetujuan OJK		Alamat Sebelumnya	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Pegawai							
	Jumlah Dikelola Sendiri	Jumlah Pihak yang Bekerja Sama dengan BPR	Nama Pihak yang Bekerja Sama dengan BPR	Keterangan Data Kantor	No.	Tanggal			Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap	Penghimpunan Dana	Penyaluran Dana	Lainnya	Penghimpunan Dana	Penyaluran Dana	Lainnya
0	0			4					1	1	2	0	0	0	0	2
0	0			4					0	0	0	1	1	1	1	0

Form A.05.05
Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Persekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Jenis	Kode Kantor Kas	Sandi Kantor Induk	Sandi Kantor Cabang Sebelumnya	Nama Kantor Kas	Koordinat	Alamat	Nama Pimpinan	No. Telepon
-------	-----------------	--------------------	--------------------------------	-----------------	-----------	--------	---------------	-------------

Form A.05.05
Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Aplikasi Pelaporan Online UKR (AP-ULU)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Persekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Keterangan Data Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas	Tanggal Pelaksanaan	Sandi Kantor Kendali	Tanggal Persetujuan
---	---------------------	----------------------	---------------------

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Bank/LJK Lain/ Lembaga Lain	Jenis Kerja Sama	Uraian Kerja Sama	Tanggal Mulai Kerja Sama
RSUD BUNUT	PEMOTONGAN ANGSURAN	PEMASARAN KREDIT PADA KARYAWAN RSUD BUNUT	01-09-2016
KSP NUSANTARA	PEMOTONGAN ANGSURAN	PEMASARAN KREDIT PADA KARYAWAN KSP NUSANTARA	16-08-2016
KSP NUSANTARA	PEMOTONGAN ANGSURAN	PENERUSAN KREDIT CHANNELING KEPADA PENSUNAN	18-07-2024

Keterangan : -

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Komposisi Karyawan	Jumlah
Bidang Tugas	
1. Pemasaran	2
2. Pelayanan	2
3. Lainnya	4
Status Kepegawaian	
1. Pegawai Tetap	4
2. Pegawai Tidak Tetap	4
Tingkat Pendidikan	
1. S3	0
2. S2	0
3. S1	4
4. D3	1
5. SMA	3
6. Lainnya	0
Jenis Kelamin	
1. Laki-laki	3
2. Perempuan	5
Usia	
1. Usia ≤25 tahun	2
2. Usia 26-35 tahun	1
3. Usia 36-45 tahun	4
4. Usia 46-55 tahun	1
5. Usia >55 tahun	0

Form A.05.07.2
Pengembangan Sumber Daya Manusia - Kegiatan Pengembangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Persekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Kegiatan Pengembangan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Peserta
Kegiatan Training	23-01-2025	02	03		1 LAP TINGKAT KESEHATAN
Kegiatan Training	14-04-2025	02	03		1 LAP KEBERLANJUTAN
Kegiatan Training	14-04-2025	02	03		1 LAP TAHUNAN MELALUI APOLO
Kegiatan Training	09-05-2025	02	03		1 PELATIHAN AUDIT BERBASIS RISIKO
Kegiatan Training	21-07-2025	02	01		2 PENYIAPAN LAP TKS GABUNG KEPATUHAN & AUDIT
Kegiatan Training	06-11-2025	02	03		1 PELATIHAN RBB
Kegiatan Training	11-12-2025	02	01		2 PENILAIAN LAP TKS +KEPATUHAN & AUDIT PADA LAP
SDM Keterangan					

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
Kas dalam Rupiah	37.455.800	10.934.100
Kas dalam Valuta Asing	0	0
Surat Berharga	0	0
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	0
Penempatan pada Bank Lain	743.368.592	936.490.039
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	0
Kredit yang Diberikan (Baki Debet)	7.469.610.703	6.768.457.268
-/- Provisi Belum Diamortisasi	48.087.174	54.909.549
Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
-/- Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi	0	0
-/- Cadangan Kerugian Restrukturisasi	0	0
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	233.156.809	252.101.644
Penyertaan Modal	0	0
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	0
Agunan yang diambil alih	0	0
Properti Terbengkalai	0	0
Aset Tetap dan Inventaris	3.209.162.233	3.209.162.233
-/- Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai	2.365.956.183	2.245.507.502
Aset Tidak Berwujud	247.705.905	225.448.905
-/- Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai	226.190.804	222.928.047
Aset Antarkantor	0	0
Aset Keuangan Lainnya	0	0
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	0
Aset Lainnya	501.436.660	533.884.788
TOTAL ASET	9.335.348.923	8.908.930.591
LIABILITAS		
Liabilitas Segera	22.756.196	38.361.588
Simpanan		
a. Tabungan	1.048.634.921	1.488.465.895
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
b. Deposito	1.163.452.702	208.500.000
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
Simpanan dari Bank Lain	0	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
Pinjaman yang Diterima	0	0
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
-/- Diskonto Belum Diamortisasi	0	0
Dana Setoran Modal-Kewajiban	0	0
Liabilitas Antarkantor	0	0
Liabilitas Lainnya	39.578.489	180.499.999
TOTAL LIABILITAS	2.274.422.308	1.915.827.482
EKUITAS		
Modal Disetor		
a. Modal Dasar	10.000.000.000	10.000.000.000
b. Modal yang Belum Disetor -/-	500.000.000	500.000.000
Tambahan Modal Disetor		
a. Agio	0	0
b. Modal Sumbangan	0	0
c. Dana Setoran Modal - Ekuitas	0	0
d. Tambahan Modal Disetor Lainnya	0	0
Ekuitas Lain		
a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	871.896.980	871.896.980
c. Lainnya	0	0
d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain	0	0
Cadangan		
a. Umum	781.294.071	781.294.071
b. Tujuan	0	0
Laba (Rugi)		
a. Tahun-Tahun Lalu	(3.985.655.049)	(4.207.273.178)
b. Tahun Berjalan	(106.609.387)	47.185.236
TOTAL EKUITAS	7.060.926.615	6.993.103.109

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Pos si Yang Sama Tahun Sebelumnya
Pendapatan Operasional	1.442.790.088	1.450.491.893
1 Pendapatan Bunga		
a Bunga Kontraktual		
i. Surat Berharga	0	0
ii. Penempatan pada Bank Lain		
Giro	1.859.116	987.605
Tabungan	2.150	467.450
Deposito	0	0
Sertifikat Deposito	0	0
iii. Kredit yang Diberikan		
Kepada Bank Lain	0	0
Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	1.237.054.637	1.265.504.648
b Provisi Kredit		
i. Kepada Bank Lain	0	0
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	42.156.875	55.608.479
c Biaya Transaksi -/-		
i. Surat Berharga	0	0
ii. Kredit yang Diberikan		
Kepada Bank Lain	0	0
Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	0	0
d. Koreksi Atas Pendapatan Bunga -/-	0	0
2 Pendapatan Lainnya		
a Pendapatan Jasa Transaksi	0	0
b Keuntungan Penjualan Valuta Asing	0	0
c Keuntungan Penjualan Surat Berharga	0	0
d Penerimaan Kredit yang Dihapusbuku	0	0
e Pemulihan CKPN	108.268.736	41.343.026
f Dividen	0	0
g Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0	0
h Keuntungan penjualan AYDA	0	0
i Pendapatan Ganti Rugi Asuransi	0	0
j Pemulihan penurunan nilai AYDA	0	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
k Lainnya	53.448.574	86.580.685
Beban Operasional	1.607.395.669	1.404.252.965
1 Beban Bunga		
a Beban Bunga Kontraktual		
i. Tabungan	13.227.078	15.223.981
ii. Deposito	22.670.012	1.707.221
iii. Simpanan dari bank lain	0	0
iv. Pinjaman yang diterima		
1) Dari Bank Indonesia	0	0
2) Dari Bank Lain	0	0
3) Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	0	0
4) Berupa Pinjaman Subordinasi	0	0
v. Lainnya	0	0
b Biaya Transaksi		
i. Kepada Bank Lain	0	0
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	0	0
2 Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	0	0
3 Beban Kerugian Penurunan Nilai		
a. Surat Berharga	0	0
b. Penempatan pada Bank Lain	0	0
c. Kredit yang Diberikan		
i. Kepada Bank Lain	0	0
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	89.323.901	85.066.430
d. Penyertaan Modal	0	0
e. Aset Keuangan Lainnya	0	0
4 Beban Pemasaran	34.246.262	50.598.406
5 Beban Penelitian dan Pengembangan	0	0
6 Beban Administrasi dan Umum		
a Beban Tenaga Kerja		
i. Gaji dan Upah	729.301.259	663.421.989
ii. Honorarium	176.000.000	120.000.000
iii. Lainnya	70.100.945	51.145.411
b Beban Pendidikan dan Pelatihan	41.728.370	0
c Beban Sewa		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
i. Gedung Kantor	51.666.667	59.570.707
ii. Lainnya	66.378.000	63.117.821
d Beban Penyusutan/Penghapusan atas Aset Tetap dan Inventaris	120.448.680	119.277.852
e Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	3.262.757	2.749.992
f Beban Premi Asuransi	0	0
g Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	17.748.457	19.500.114
h Beban Barang dan Jasa	116.853.521	107.886.190
i Beban Penyelenggaraan Teknologi Informasi	0	0
j Kerugian terkait risiko operasional		
a. Kecurangan internal	0	0
b. Kejahatan eksternal	0	0
k Pajak-pajak	812.660	11.750.000
7 Beban Lainnya		
a Kerugian Penjualan Valuta Asing	0	0
b Kerugian Penjualan Surat Berharga	0	0
c Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0	0
d Kerugian penjualan AYDA	0	0
e Kerugian penurunan nilai AYDA	0	0
f Lainnya	53.627.100	33.236.851
Laba (Rugi) Operasional	(164.605.581)	46.238.928
Pendapatan Non Operasional	2.503.017	4.524.151
1 Keuntungan Penjualan		
a Aset Tetap dan Inventaris	0	0
2 Pemulihan Penurunan Nilai		
a Aset Tetap dan Inventaris	0	0
b Lainnya	0	0
3 Bunga Antar Kantor	0	0
4 Selisih Kurs	0	0
5 Lainnya	2.503.017	4.524.151
Beban Non Operasional	120.397	3.577.843
1 Kerugian Penjualan/Kehilangan		
a Aset Tetap dan Inventaris	0	0
2 Kerugian Penurunan Nilai		
a Aset Tetap dan Inventaris	0	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
b Lainnya	0	0
3 Bunga Antar Kantor	0	0
4 Selisih Kurs	0	0
5 Lainnya	120.397	3.577.843
Laba (Rugi) Non Operasional	2.382.620	946.303
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	(162.222.961)	47.185.236
Taksiran Pajak Penghasilan	0	0
Pendapatan Pajak Tangguhan	55.613.574	0
Beban Pajak Tangguhan	0	0
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(106.609.387)	47.185.236
Penghasilan Komprehensif Lain		
1. Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan terkait	0	0
2. Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi		
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan terkait	0	0
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	0	0
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	0	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
Tagihan Komitmen		
a. Fasilitas Pinjaman yang Diterima yang Belum Ditarik	0	0
b. Tagihan Komitmen Lainnya	0	0
Kewajiban Komitmen		
a. Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Ditarik	0	0
b. Penerusan Kredit	0	0
c. Kewajiban Komitmen Lainnya	0	0
Tagihan Kontinjensi		
a. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian		
1) Bunga Kredit yang Diberikan	84.073.285	63.794.184
2) Bunga Penempatan pada Bank Lain	0	0
3) Surat Berharga	0	0
4) Lainnya	0	0
b. Aset Produktif yang dihapusbuku		
1) Kredit yang Diberikan	0	0
2) Penempatan pada Bank Lain	0	0
3) Pendapatan Bunga Atas Kredit yang dihapusbuku	0	0
4) Pendapatan Bunga Atas Penempatan Dana pada Bank Lain yang dihapusbuku	0	0
c. Agunan dalam Proses Penyelesaian Kredit	0	0
d. Tagihan Kontinjensi Lainnya	0	0
Kewajiban Kontinjensi	0	0
Rekening Administratif Lainnya	0	0

Form B.04.00
Laporan Perubahan Ekuitas

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Persekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Pos	Modal Disetor	Tambahan Modal	Modal Sumbangan	DSM Ekuitas	Labar/ Rugi Yang Belum Direalisasi
Saldo per 31 Des Tahun T-2	9.500.000,000	0	0	0	(4.207.273,178)
Dividen	0	0	0	0	0
Pembentukan Cadangan	0	0	0	0	0
Setoran Modal	0	0	0	0	0
Labar/Rugi yang Belum Direalisasi	0	0	0	0	0
Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0	0
Labar/Rugi Periode Berjalan	0	0	0	0	47.185.236
Pos Penambah/Pengurang Lainnya	0	0	0	0	174.432.893
Saldo per 31 Des Tahun T-1	9.500.000,000	0	0	0	(3.985.655,049)
Dividen	0	0	0	0	0
Pembentukan Cadangan	0	0	0	0	0
Setoran Modal	0	0	0	0	0
Labar/Rugi yang Belum Direalisasi	0	0	0	0	0
Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0	0
Labar/Rugi Periode Berjalan	0	0	0	0	(106.609,387)
Pos Penambah/Pengurang Lainnya	0	0	0	0	0
Saldo per 31 Des Tahun T	9.500.000,000	0	0	0	(4.092.264,436)

FORM B.05.00
LAPORAN ARUS KAS



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Pos	Saldo 31 Desember T	Saldo 31 Desember T-1
Anus Kas dari Aktivitas Operasi Metode Langsung		
Penerimaan pendapatan bunga	1.238.915.903	1.266.959.703
Penerimaan pendapatan provisi dan jasa transaksi	42.156.875	55.608.479
Penerimaan beban klaim asuransi	0	0
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan	0	0
Pendapatan operasional lainnya	161.717.310	127.923.711
Pembayaran beban bunga	35.897.090	16.931.202
Beban gaji dan tunjangan	975.402.204	834.567.400
Beban umum dan administrasi	418.899.112	383.852.676
Beban operasional lainnya	177.197.263	168.901.687
Pendapatan non operasional lainnya	2.503.017	4.524.151
Beban non operasional lainnya	120.397	3.577.843
Pembayaran pajak penghasilan	0	0
Penyesuaian lainnya atas pendapatan dan beban	0	0
Penurunan/Peningkatan atas aset operasional		
Penempatan pada bank lain	743.368.592	936.490.039
Kredit yang diberikan	7.421.523.529	6.713.547.719
Agunan yang diambil alih	0	0
Aset lain-lain	268.279.851	281.783.144

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Pos	Saldo 31 Desember T	Saldo 31 Desember T-1
Penyesuaian lainnya atas aset operasional	0	0
Kenaikan/Peningkatan atas liabilitas operasional		
Liabilitas segera	22.756.196	38.361.588
Tabungan	1.048.634.921	1.488.465.895
Deposito	1.163.452.702	208.500.000
Simpanan dari bank lain	0	0
Pinjaman yang diterima	0	0
Liabilitas imbalan kerja	0	0
Liabilitas lain-lain	39.578.489	180.499.999
Penyesuaian lainnya atas liabilitas operasional	0	0
Arus Kas neto dari aktivitas operasi	13.760.403.451	12.710.495.236
Arus Kas dari aktivitas Investasi		
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	843.206.050	963.654.731
Pembelian/penjualan aset tidak berwujud	21.515.101	2.520.858
Pembelian/penjualan Surat Berharga	0	0
Pembelian/penjualan Penyertaan Modal	0	0
Penyesuaian lainnya	0	0
Arus Kas neto dari aktivitas Investasi	864.721.151	966.175.589
Arus Kas dari aktivitas Pendanaan		

FORM B.05.00
LAPORAN ARUS KAS



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Pos	Saldo 31 Desember T	Saldo 31 Desember T-1
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal pelengkap	0	0
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal inti tambahan	0	0
Pembayaran dividen	0	0
Penyesuaian lainnya	0	0
Arus Kas neto dari aktivitas Pendanaan	0	0
Peningkatan (Penurunan) Arus Kas	14.625.124.602	13.676.670.825
Kas dan setara Kas awal periode	37.455.800	10.934.100
Kas dan setara Kas akhir periode	14.662.580.402	13.687.604.925

LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Nama BPR : PT. BPR DANA POS

Posisi Laporan : 2025

Berikut adalah laporan Akuntan Publik berdasarkan hasil audit untuk periode posisi laporan 2025 adalah sebagai berikut:

Tahun buku 2025 PT BPR Dana Pos tidak melakukan kerjasama dengan pihak Audit eksternal (AP/KAP) dikarenakan asset PT. BPR Dana Pos pada posisi Desember 2025 sebesar Rp9.335.348.924,-, asset dibawah Rp10 M sehingga BPR Dana Pos tidak diwajibkan untuk dilakukan audit oleh AP/KAP. Laporan Keuangan tahunan telah disampaikan dan disetujui oleh Pemegang saham yang tertuang dalam RUPS tanggal 08 Januari 2026.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Opini Akuntan Publik

Nama Akuntan Publik

05

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

Sesuai POJK nomor 15 tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, dengan ini Direksi **PT BPR Dana Pos** menyatakan bahwa:

1. Direksi bertanggung jawab dalam penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan, antara lain:
 - a. Penyusunan dan penyajian Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan.
 - b. Kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan OJK mengenai pencatatan transaksi keuangan
 - c. Kelengkapan dan kebenaran isi Laporan Keuangan.
 - d. Penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.
2. Untuk itu telah ditunjuk seorang penanggung jawab pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan **BPR** tahun 2025 dengan ketentuan Standar Akuntansi Entitas Privat (SAK-EP) dan Pedoman Akuntansi Perbankan bagi Bank Perekonomian Rakyat nomor 21/SEOJK.03/2024 dan telah dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 08 Januari 2026.
4. Seluruh informasi yang disampaikan dalam laporan tahunan 2025 adalah benar dan sesuai dengan kondisi BPR yang sebenarnya.
5. Pengendalian yang dilakukan adalah memastikan laporan disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu. Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pelaporan keuangan melakukan validasi data dan informasi yang disajikan adalah benar dan sesuai dengan kondisi BPR yang sebenarnya.
6. Pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan dinilai cukup efektif dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Cianjur, 26 Januari 2026

PT. BPR Dana Pos



SPOLITERBUK RUPIAH
1000
METERAI
TEMPEL
4122ANX266310596

Muhammad Ali

Direktur Utama

Yayat Suryatna

Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
11-08-2025	01	Perayaan HUT Kemerdekaan di lingkungan RSUD Bunut	Bendahara Acara	250.000
12-08-2025	02	Perayaan HUT Kemerdekaan di lingkungan RW 07 Kel. Cikole	Bendahara Acara	100.000
14-08-2025	02	Perayaan HUT Kemerdekaan di lingkungan RT 01 Kel. Pamoyanan	Bendahara Acara	100.000

Form E.10.00

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Penggambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
RAHMAT	PSP	MUHAMMAD ALI	DIREKTUR UTAMA	Transfer	125	Sewa Ruang untuk gudang kepada Joshua Rahmat anak kandung dari Bp. Rahmat selaku PSP pada BPR Dana Pos

Harga sewa dibawah harga pasaran, yaitu sebesar Rp12.500.000,- sementara harga pasar antara Rp70.000.000 sd Rp80.000.000,

Form E.09.00
Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Permasalahan Hukum		Perdata	Pidana
Telah Selesai (tel: mempunyai kekuatan hukum yang tetap)		1	0
Dalam Proses Penyelesaian		0	0
Total		1	0

Tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi selama tahun 2025

Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

 Nama Lembaga *Jasa Keuangan* : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh								
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap		
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan									
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum									

Pada tahun 2025 alhamdulillah tidak ada temuan fraud baik yang dilakukan oleh pengurus (Direksi & Komisaris) maupun oleh karyawan



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
	Fisik	Telekonferensi	
H. DADANG RACHMAT, SE, MSI	5	0	100,00
KENNY RAHMAT	1	0	20,00

Kehadiran anggota dewan komisaris selama tahun 2025 telah sesuai dengan jumlah kehadiran minimal, adapun untuk pa Kenny m lal menjabat dari 26 Mei 2025

Form E.07.01
Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Persekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
06-01-2025	2	Agar segera menindaklanjuti pemenuhan pengurusan yaitu Direktur dan anggota Komisaris, Komisaris menyetujui RBB tahun 2025, dan Laporan keuangan tahun 2024 agar segera diajukan untuk mendapat persetujuan dalam RUPS
03-03-2025	2	Dengan telah keluarnya surat SRT-17/KO.122/2025 tanggal 30 Jan 2025 agar Direksi segera melengkapi RUPS, membuat akta notaris tentang perubahan susunan pengurus
26-05-2025	3	Dengan terpenuhinya pengurus diharapkan BPR dapat lebih maju lagi. Target pertumbuhan seperti yang tercantum dalam RBB tahun 2025 belum menunjukkan pertumbuhan yang mengembirakan agar menjadi perhatian utama pengurus. Penyaluran kredit Channeling agar bunga diproyeksikan naik dari semula 13% menjadi 15%, Pengalangan DPK agar BPR membuat produk yang dapat memberi keuntungan berbeda. Penyelesaian Transfer dana milik PT. Asuransi Kresna (dalam likuidasi) dapat ditransfer hanya dilakukan ke rekening an Tim Likuidator QQ PT. Asuransi Jiwa Kresna (dalam likuidasi).
17-11-2025	3	A. Temuan OJK atas adanya rangkap jabatan, saat ini BPR belum memungkinkan untuk adanya penambahan karyawan, Direksi telah mencabut SK 003/DIR-BPR/III/2024. Pemulihan grade karyawan terdampak SK tersebut belum dapat dipulihkan, Implementasi CKPN telah dilakukan ke sistem namun direksi belum memutuskan metode mana yang akan digunakan. B. RBB 2026 BPR akan mengarap channeling P2P Lending, terkait hal tersebut akan melakukan upgrade CBS, akan bekerjasama dengan koperasi2 penyalur kredit, akan mencari pinjaman Bank, kembali menyalurkan kredit UMKM, akan melakukan penambahan karyawan
08-12-2025	4	Evaluasi kepatuhan terhadap kebijakan/pedoman yang berlaku di BPR. Evaluasi kepatuhan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan M/R, Operasional, Likuiditas dan Pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi tersebut. Pengawasan dan evaluasi hasil pertanggungjawaban Direksi terhadap perkembangan BPR. Pengarahan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR. Tindak lanjut audit dan hasil pemeriksaan OJK. Penyampaian RBB BPR tahun 2026

Agenda rapat yang telah dijalankan oleh Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi pada tahun 2025 telah dituangkan dalam Notulen Rapat.

Form E.06.00
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,63	
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,36	
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25	
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,50	
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,96	

Penentuan gaji pegawai disesuaikan dengan UMR, dan untuk direksi serta komisaris ditentukan berdasarkan RUPS.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
Gaji	2	257.000.000	2	176.000.000
Tunjangan	2	14.904.812	2	8.582.400
Tantem	0	0	0	0
Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
Remunerasi lainnya	0	0	0	0
Total Remunerasi		271.904.812		184.582.400
Jenis Fasilitas Lain				
Perumahan	0	0	0	0
Transportasi	1	65.268.000	0	0
Asuransi Kesehatan	2	8.840.000	0	0
Fasilitas Lain-Lainnya	0	0	0	0
Total Fasilitas Lain		74.108.000		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		346.012.812		184.582.400

Penentuan gaji untuk direksi serta komisaris ditentukan berdasarkan RUPS dan untuk Direktur Utama ada fasilitas lainnya berupa sewa kendaraan

Form E.04.02

Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Hubungan Keluarga		
	I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Pemegang Saham
	Anggota Direksi		
	Anggota Dewan Komisaris		
	Pemegang Saham		
DADANG RACHMAT	tidak ada	tidak ada	tidak ada
RAHMAT	tidak ada	ada	tidak ada
DADANG RACHMAT	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Direktur Utama, Direktur, Komisaris Utama dan Pemegang Saham tidak memiliki hubungan keluarga satu sama lain, sementara Komisaris memiliki hubungan kekeluargaan dengan PSP

Form E.04.01

Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Hubungan Keuangan		
	I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Pemegang Saham
MUHAMMAD ALI	tidak ada	tidak ada	tidak ada
YAYAT SURYATNA	tidak ada	tidak ada	tidak ada
Pemegang Saham			
DADANG RACHMAT	tidak ada	tidak ada	tidak ada
RAHMAT	tidak ada	ada	tidak ada
DADANG RACHMAT	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Direktur Utama, Direktur, Komisaris Utama, dan Pemegang Saham tidak memiliki hubungan keuangan satu sama lain

Form E.03.03

Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Sandi Bank Lain	Nama Bank/Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
Anggota Direksi			
Anggota Dewan Komisaris			

Direktur Utama, Direktur, Komisaris Utama dan Komisaris tidak memiliki saham pada Bank Lain maupun Perusahaan lain

Form E.03.02
Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Nama Perusahaan dalam Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
Anggota Direksi			
Anggota Dewan Komisaris			
Pemegang Saham			

Bapak Rahmat sebagai Pemegang saham pengendali dengan kepemilikan saham sebesar Rp9.200.000.000,- dan Bapak H. Dadang Rachmat dengan kepemilikan saham sebesar Rp300.000.000,-

Form E.03.01
Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
Anggota Direksi				
MUHAMMAD ALI YAYAT SURYATNA				
Anggota Dewan Komisaris				
H. DADANG RACHMAT, SE, MSI	300.000.000,00	3,16	300.000.000,00	3,16
KENNY RAHMAT				

Form E.02.04
Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Persektorian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
		Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	

Dikarenakan modal inti BPR DanaPos dibawah 50 M maka BPR Dana Pos belum diwajibkan untuk membentuk komite audit, komite pemantauan resiko dan komite remunerasi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Desember 2025

Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
--------	--------------------------	---------------	-----------	--------------

Dikarenakan modal inti BPR DanaPos dibawah 50 M maka BPR Dana Pos belum diwajibkan untuk membentuk komite audit, komite pemantauan resiko dan komite remunerasi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Persegi Dua Indonesia Tbk
Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
------	---------	--------------------------

<p>H. DADANG RACHMAT, SE, MSI Komisaris Utama</p>	<p>Komisaris</p>	<p>Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk kepentingan BPR. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan MR serta kebijakan strategis. Dalam penyusunan dana kepada pihak terkait agar sesuai ketentuan OJK mengenai BMPK. Mengawasi tugas direksi dan memastikan tindak lanjut hasil pengawasan komisaris. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut temuan AI dan hasil pemeriksaan OJK. Membuat kebijakan dan menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Membuat laporan adanya pelanggaran dan keadaan yang membahayakan BPR ke OJK. Membuat Pedoman dan Taub Dewan Komisaris. Wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara optimal.</p>
<p>KENNY RAHMAT Komisaris</p>	<p>Komisaris</p>	<p>Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk kepentingan BPR. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan MR serta kebijakan strategis. Dalam penyusunan dana kepada pihak terkait agar sesuai ketentuan OJK mengenai BMPK. Mengawasi tugas direksi dan memastikan tindak lanjut hasil pengawasan komisaris. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut temuan AI dan hasil pemeriksaan OJK. Membuat kebijakan dan menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Membuat laporan adanya pelanggaran dan keadaan yang membahayakan BPR ke OJK. Membuat Pedoman dan Taub Dewan Komisaris. Wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara optimal.</p>

Rekomendasi kepada Direksi

Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan pedoman taub Komisaris, guna memastikan seluruh kegiatan BPR berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik

Keterangan

Komisaris Utama telah lulus uji kompetensi dengan sertifikat nomor 64127 1120 6 0844 2022 an Dadang Rahmat dan nomor 64131 1120 6 2131 2024 An Kenny rahmat

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Persewaan Rakyat Dana Pos
Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
MUHAMMAD ALI	Direktur Utama	Tugas dan tanggungjawab Direksi: Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan BPR, Menyajikan RBB, Membuat laporan tahunan, Menyajikan laporan Manajemen, Menyajikan susunan organisasi, Menjelaskan kewajiban lainnya sesuai ketentuan, Bertanggungjawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian perseroan yang disebabkan kelalaian dalam menjalankan tugas kecuall dapat mengakibatkan tidak teribat dan telah melakukan tindakan pencegahan, Memperhatikan ketentuan yang berlaku, Membertahukan kepada Dewan Komisaris mengenai kerjasama yang dilakukan BPR, Meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan, Melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab, tidak baik dan penuh kehati-hatian, Melaksanakan tata kelola yang baik, memastikan terpenunhinya SDM yang memadai, Pemisahan tugas dan tanggungjawab tiap unit kerja, menunjuk audit internal, pelaksanaan tindak lanjut temuan audit internal dan hasil pemeriksaan OJK dan otoritas lain, Membuat kebijakan remunerasi untuk PE dan karyawan, Menyajikan data dan informasi terkait BPR yang akurat, relevan, tepat waktu, Keputusan yang diambil berdasar pada pedoman dan taib Direksi.

YAYAT SURYATNA	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan: merumuskan strategi serta mendorong terciptanya budaya kepatuhan, memastikan kegiatan usaha BPR mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku : pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat, pelaksanaan peningkatan literasi dan inklusi keuangan, pelaksanaan sosialisasi ketentuan internal, pemenuhan permintaan data dari OJK serta pemberian saran atas permasalahan dari unit kerja internal.
----------------	--	--

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris
Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab senantiasa berpedoman pada Taib Direksi

Keterangan
Direksi telah lulus uji kompetensi dengan sertifikat nomor 64131 1120 6 1545 2024 an Muhammad Ali dan 64131 1120 6 2107 2024 an Yayat Suryatna

Nama Lembaga Jasa Keuangan

: PT Bank Persekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan

: Desember 2025

Informasi	Keterangan
-----------	------------

Alamat

Jl. KH. Abdullah Bin Nuh No. 18-19 Cianjur 43211

Nomor Telepon

0263-268588

Penjelasan Umum

Penyusunan laporan transparansi pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dilakukan dalam rangka penerapan prinsip ketebukan (transparency) akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independence), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya. Dari pengertian tersebut agar pengelolaan usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola (Good Corporate Governance) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip dasar tata kelola dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan Visi, Misi, Rencana Strategis, Pelaksanaan Kebijakan dan langkah-langkah Pengawasan Internal pada seluruh jenjang organisasi. Tata Kelola PT. BPR Dana Pos telah merujuk pada Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat POJK No. 9 Tahun 2024

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Mandiri (Self Assessment) Tata Kelola

3

Penilaian Peringkat Komposit Hasil Penilaian Mandiri (Self Assessment) Tata Kelola

Manajemen BPR telah menerapkan tata kelola perusahaan secara umum dengan cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip-prinsip tata kelola yang dinilai cukup memadai. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola yang berstrik cukup signifikan dan memerlukan perhatian lebih lanjut dari manajemen, dengan masih adanya rangkap jabatan

DOKUMEN PENDUKUNG LAPORAN TAHUNAN

Nama BPR : PT. BPR DanaPos

Posisi Laporan : 2025

Berikut ini adalah lampiran dokumen pendukung yang digunakan dalam menyusun laporan tahunan:

1. Laporan Keuangan PT. BPR DanaPos Posisi Desember 2025.
2. RUPS Pertanggungjawaban atas Laporan Keuangan tahun buku 2025.
3. Sertifikat Kompetensi 64131 1120 6 2107 2024 an Yayasan Suryana.
4. Surat Persetujuan OJK dengan nomor KEP-33/KO.12/2025 tentang hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sdr. Yayat Suryatna selaku calon anggota direksi PT. BPR DanaPos.
5. Sertifikat Kompetensi 64131 1120 6 2131 2024 an Kenny Rahmat, SE.
6. Surat Persetujuan OJK dengan nomor KEP-34/KO.12/2025 tentang hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sdr. Kenny Rahmat selaku calon anggota dewan komisaris PT. BPR DanaPos.
7. Surat Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Anggota Dewan Komisaris serta Calon Direksi dan / atau Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
8. RUPS Pengangkatan Anggota Dewan KOMisaris dan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
9. Akta Notaris No.01 tanggal 02 Mei 2025 Pengangkatan sebagai anggota Direksi dan Komisaris.
10. SK Menhukam Nomor : AHU-AH.01.09-0220358
11. Surat Perjanjian **upgrade dan pengembangan system**, dengan perjanjian nomor 078/36/PKS-NBP-BPR-DP/X/2025 tentang upgrade aplikasi NBP SYS 5.0, jasa pemeliharaan (maintenance) Teknologi system Informasi (TSI) terbatas pada aplikasi NBP SYS 5.0

Cianjur, 26 Januari 2026

PT. BPR DanaPos



Muhammad Ali
Direktur Utama



H. Dadang Rachmat
Komisaris Utama

NERACA KONSOLIDASI PERIODE TGL : 31 Desember 2025

NO-BB	KETERANGAN	SALDO	NO-BB	KETERANGAN	SALDO
111000	KAS	37,455,800.00	211000	KEWAJIBAN SEGERA (KS)	22,756,196.00
114000	PEND. BUNGA YANG AKAN DITERIMA	47,015,066.31	212000	UTANG BUNGA	4,610,119.00
115000	PENEMPATAN BANK LAIN	743,368,592.30	214000	SIMPANAN	2,212,087,623.24
117000	KREDIT YANG DIBERIKAN	7,421,523,529.00	222000	KEWAJIBAN LAIN-LAIN (KEW.LAIN)	34,968,369.80
118000	PENYISIHAN KERUGIAN KREDIT	-233,156,809.00	311000	MODAL	9,500,000,000.00
120000	ASET TETAP & INVETARIS (ATI)	3,209,162,232.81	314000	SURPLUS REVALUASI AKTIVA TE	818,146,500.00
121000	AKUM.PENYUSUTAN ATI	-2,365,956,182.28	315000	SALDO LABA	-3,257,219,884.04
122000	ASET TIDAK BERWUJUD	247,705,905.00			
123000	AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	-226,190,804.08			
125000	ASET LAIN-LAIN	454,421,593.94			
	TOTAL AKTIVA	9,335,348,924.00		TOTAL PASIVA	9,335,348,924.00



Mengetahui,

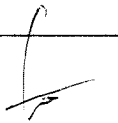

Muhammad Ali
 Direktur

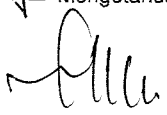
NO-SBB	KETERANGAN	SALDO	NO-SBB	KETERANGAN	SALDO
111100	KAS-KHASANAH	31,955,800.00	211130	KS.POT. PAJAK 21	1,752,246.00
111999	KAS-KECIL	5,500,000.00	211140	KS.POT. PAJAK 23	116,880.00
114200	PEND.BNG.KREDIT LANCAR	47,012,916.00	211160	KS.POT. PAJAK PS.4 AY.TAB	27,459.00
114300	PEND.BNG.PBL TABUNGAN	2,150.31	211170	KS.POT. PAJAK PS.4 AY.DEP	870,149.00
115110	PBL-GIRO BANK BCA 1970137081	351,817,261.86	211190	KS.TITIPAN PREMI JAMSOSTEK	4,862,706.00
115120	PBL-GIRO BANK BCA CAB SUKABUMI	1,949,375.34	211250	KS.TITIPAN SETORAN	3,187,700.00
115150	PBL-GIRO BANK BCA BJB	11,429,108.00	211290	KS. TITIPAN BPJS	2,846,396.00
115170	PBL-GIRO BANK BRI	2,497,886.60	211300	KS. TITIPAN JP	1,890,682.00
115180	PBL-GIRO BANK MANDIRI CIANJUR	1,975,000.00	211999	KS.TITIPAN LAINNYA	7,201,978.00
115240	PBL-GIRO BANK BNI 8808888829	343,196,275.93	212100	UTANG BUDEP YMHD	4,013,555.00
115250	PBL-GIRO BJB SMI 0078161698001	1,767,696.00	212200	UTANG BUDEP JATUH TEMPO	596,564.00
115280	PBL-GIRO BNI CAD.DPLK	334,887.00	214110	TABUNGAN KREDIT	320,976,806.81
115310	PBL-TABUNGAN BANK MEGA	9,373,112.93	214111	TABUNGAN DANA PLUS	727,633,893.43
115320	PBL-TABUNGAN BANK MUAMALAT	12,136,741.37	214113	TABUNGAN PLUS PLUS	24,221.00
115330	PBL-TABUNGAN BANK MANDIRI CIAN	952,725.18	214210	DEPOSITO 1 BLN	505,952,702.00
115340	PBL-TABUNGAN BANK MANDIRI CICU	5,278,477.37	214220	DEPOSITO 3 BLN	657,500,000.00
115380	PBL-TABUNGAN MUAMALAT SUKABUM	660,044.72	222400	KEW.LAIN.CAD.BY.PENDIDIKAN	34,968,369.80
117110	KYD-BD. LANCAR	7,091,458,971.00	311100	MODAL DISETOR	9,500,000,000.00
117115	KYD-BD. DPK	48,030,472.00	314100	SURPLUS REVALUASI AKTIVA TE	818,146,500.00
117120	KYD-BD. KURANG LANCAR	114,452,473.00	315200	CADANGAN UMUM	781,294,071.03
117130	KYD-BD. DIRAGUKAN	26,341,376.00	315300	LABA/RUGI TAHUN LALU	-3,985,655,049.10
117140	KYD-BD. MACET	189,327,411.00	315400	LABA/RUGI TAHUN BERJALAN	-106,609,385.97
117200	KYD-PROVISI	-48,087,174.00	315700	TAX AMNESTY	53,750,480.00
118100	PENYISIHAN KERUGIAN KREDIT	-233,156,809.00			
120100	ATI.TANAH	360,000,000.00			
120200	ATI.BANGUNAN	1,848,450,000.00			
120300	ATI.GOLONGAN I	946,961,752.81			
120600	ATI TAX AMNESTY	53,750,480.00			
121200	AKUM.PENYU.ATI.BANGUNAN	-1,379,890,984.35			
121300	AKUM.PENYU.ATI.GOL. I	-932,314,717.47			
121600	AKUM. ATI TAX AMNESTY	-53,750,480.46			
122100	ASET TIDAK BERWUJUD GOL. I	247,705,905.00			
123100	AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	-226,190,804.08			
125200	PERSEDIAAN BARANG CETAKAN	39,473,143.00			
125300	PERSEDIAAN BARANG PROMOSI	1,146,250.00			
125400	PERSEDIAAN MATERAI	1,200,000.00			
125500	PERSEDIAAN ATK	1,023,834.00			
125598	PERSEDIAAN - LOGAM MULIA	5,700,000.00			
125621	BDD - SEWA GEDUNG	45,694,444.41			
125624	BDD - LPS	0.04			
125630	BDD - RENOVASI GEDUNG	42,585,684.27			
125631	BDD - NOTARIS	1,666,666.64			
125637	BDD - THR	9,582,065.80			
125699	BDD - LAINNYA	100,907,966.40			
125902	ASET LAIN - TAGIHAN KLAIM ASUR	148,301,670.00			
125904	ASET LAIN - UANG JAMINAN	1,500,000.00			
125991	ASET LAIN - PAJAK TANGGUHAN	55,613,574.00			

NERACA KONSOLIDASI PERIODE TGL : 31 Desember 2025

NO-SBB	KETERANGAN	SALDO	NO-SBB	KETERANGAN	SALDO
125999	ASET LAIN2-LAINNYA	26,295.38			
TOTAL AKTIVA		9,335,348,924.00	TOTAL PASIVA		9,335,348,924.00

NPL Konsolidasi : 4.42 %



Mengetahui,


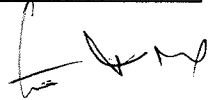
Muhammad Ali
Direktur

PT. BPR DANA POS - CIANJUR

REKENING - REKENING ADMINISTRATIF KONSOLIDASI

No	POS - POS	Jumlah (Ribuan Rp)
1	411100 FAS. PINJ DITERIMA YG BLM DITA	.00
2	412100 FAS. KREDIT YG BLM DIGUNAKAN	.00
3	421100 PEND.BNG DLM PENYELESAIAN	84,073.29
4	421200 AKT.PROD.YANG DIHAPUSBUKUKAN	.00
5	421300 LAIN2 BERSIFAT ADMINISTRATIF	.00
6	422100 KONTIJENSI	.00
7	423100 PENERUSAN CHANELING	.00

Printed By : system01 02012026-08:23:29



LABA-RUGI KONSOLIDASI PERIODE S/D TGL : 31 Desember 2025

NO-BB	KETERANGAN	SALDO	NO-BB	KETERANGAN	SALDO
610000	BEBAN BUNGA (BB)	38,985,890.96	510000	PENDAPATAN BUNGA	1,238,915,903.44
620000	BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN/F	89,323,901.00	511000	PROVISI	46,908,034.69
630000	BEBAN PEMASARAN	34,246,262.00	513000	PENDAPATAN OPERASIONAL LAI	156,966,149.74
650000	BEBAN ADMINISTRASI & UMUM	1,402,634,648.29	514000	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	3,733,231,989.29
660000	BEBAN OPERASIONAL LAINNYA (42,204,965.59			
670000	BEBAN NON OPERASIONAL	3,730,849,369.29			
	TOTAL BIAYA	5,338,245,037.13		TOTAL PENDAPATAN	5,176,022,077.16
316000	LABA/RUGI SBLM PAJAK	-162,222,959.97			
700000	TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	0.00			
720000	PEND PAJAK TANGGUHAN	55,613,574.00			
730000	BEBAN PAJAK TANGGUHAN	0.00			
315000	SALDO LABA	-106,609,385.97			



Mengetahui,


Muhammad Ali
 Direksi

NO-SBB	KETERANGAN	SALDO	NO-SBB	KETERANGAN	SALDO
611101	BB TAB DANA PLUS	9,945,537.00	510110	BNG.KREDIT LANCAR	1,232,525,664.00
611110	BB TAB KREDIT	3,281,541.00	510120	BNG.KREDIT KURANG LANCAR	1,457,807.00
611210	BB.DEPOSITO 1 BLN	8,201,792.00	510130	BNG.KREDIT DIRAGUKAN	3,071,166.00
611220	BB.DEPOSITO 3 BLN	14,468,220.00	510214	JASA GIRO BANK BNI 8808888829	1,833,002.13
613100	BEBAN PENJAMINAN LPS	3,088,800.96	510215	JASA GIRO BANK BJB	26,114.00
622100	BEBAN PENY KERUGIAN KREDIT	89,323,901.00	510222	BNG.TABUNGAN BANK MUAMALAH	4.12
630102	BBN.PEMASARAN BENDAHARA	33,577,044.00	510223	BNG.TABUNGAN BANK MANDIRI	352.95
630205	BBN.PEM. PROMOSI PENGMB LA	187,178.00	510224	BNG.TABUNGAN BANK MANDIRI	1,793.24
630999	BBN.PEMASARAN LAINNYA	482,040.00	511100	PEND.BUNGA PROVISI	42,156,874.69
651101	BTK.HONOR KOMISARIS	176,000,000.00	511200	PEND.BUNGA CHANNELING	4,751,160.00
651300	BTK.GAJI KARYAWAN	566,250,430.00	513101	PO.LAIN.DENDA KREDIT	14,762.00
651303	BTK.TUNJ PERUMAHAN KARYAW	11,300,000.00	513102	PO.LAIN.ADMINISTRASI TABUNG.	21,864,288.76
651304	BTK.TUNJ JAMSOSTEK KARYAW	34,586,629.00	513103	PO.LAIN.PENUTUPAN TABUNGAN	25,000.00
651305	BTK.TUNJ JABATAN KARYAWAN	84,000,000.00	513104	PO.LAIN.DENDA BREAK DEPOSIT	800,000.00
651308	BTK.TUNJ JP	12,777,392.00	513107	PO.LAIN.SELISIH LEBIH PPAP KY	108,268,736.00
651500	BTK.SDM LAINNYA	7,000,000.00	513110	PO.LAIN.ADMINISTRASI KREDIT	3,750,000.00
651503	BTK.LEMBUR	817,719.00	513111	PO.LAIN.PELUNASAN KREDIT	3,138,881.98
651507	BTK.TUNJ HARI RAYA	47,910,329.23	513112	PO.LAIN. ASURANSI	3,104,481.00
651511	BTK.INSENTIF	3,600,000.00	514100	PNO.BUNGA RAK	3,730,728,972.29
651515	BTK. BPJS	24,096,597.00	514300	PNO.KELEBIHAN KAS	1,826.00
651516	BTK. TUNJ MASA KERJA	7,063,107.47	514999	PNO.LAIN.LAINNYA	2,501,191.00
652100	BBN.PEND. & PELATIHAN	41,728,369.80			
653101	BBN.SEWA.GEDUNG	51,666,666.71			
653102	BBN.SEWA.KENDARAAN	65,268,000.00			
653999	BBN.SEWA.LAINNYA	1,110,000.00			
654100	BBN.PENYUSUTAN BANGUNAN	109,095,348.48			
654101	BBN.PENYUSUTAN GOL I	11,353,332.00			
654104	BBN. AMORTISASI TDK BERWUJL	3,262,757.00			
656101	BBN.B/J. AIR	2,550,900.00			
656102	BBN.B/J. LISTRIK	29,883,174.00			
656103	BBN.B/J. TELEPON	1,843,668.00			
656106	BBN.B/J. ALAT TULIS KANTOR	3,435,237.50			
656107	BBN.B/J. FOTOCOPY/PENJILIDAN	11,829,200.00			
656108	BBN.B/J. BENDA MATERAI	590,000.00			
656109	BBN.B/J. BENDA POS	817,762.00			
656110	BBN.B/J. BARANG CETAKAN BUK	19,500.00			
656111	BBN.B/J. BARANG CETAKAN FOR	60,000.00			
656112	BBN.B/J. BARANG CETAKAN LAIN	871,730.84			
656114	BBN.B/J. BEBAN NOTARIS	3,333,333.36			
656118	BBN.B/J. MAKAN DAN MINUM	2,443,500.00			
656120	BBN.B/J. BEBAN PERJALANAN DI	685,000.00			
656121	BBN.B/J. BEBAN BAHAN BAKAR	18,263,628.00			
656123	BBN.B/J. BEBAN IKLAN	2,000,000.00			
656124	BBN.B/J. EDU. LIT. KEUANGAN	1,190,000.00			

NO-SBB	KETERANGAN	SALDO	NO-SBB	KETERANGAN	SALDO
656125	BBN.B/J. BEBAN JAMUAN	375,100.00			
656126	BBN.B/J. BEBAN PARKIR/TOL	329,500.00			
656129	BBN.B/J. ADM.BANK	3,192,400.00			
656130	BBN.B/J. KEPERLUAN KANTOR	4,466,695.00			
656131	BBN.B/J. BEBAN KEBERSIHAN	1,440,000.00			
656132	BBN.B/J. BEBAN INTERNET	25,016,192.00			
656134	BBN.B/J. BEBAN KEPRLUAN KOM	1,400,000.00			
656135	BBN.B/J. BEBAN BARANG DAN J/	100,000.00			
656136	BBN B/J. SUMBANGAN	450,000.00			
656199	BBN.B/J. BEBAN KANTOR LAINNY	267,000.00			
657101	BBN.P/P GEDUNG	16,198,456.60			
657102	BBN.P/P INVENTARIS	350,000.00			
657103	BBN.P/P KENDARAAN	1,200,000.00			
657104	BBN.B/J. PUNGUTAN OJK	8,333,333.30			
658100	PAJAK KENDARAAN	265,500.00			
658110	PAJAK BANGUNAN	547,160.00			
660108	BO.LAIN.JAMUAN TAMU DIREKSI	290,000.00			
660999	BO.LAIN.LAINNYA	41,914,965.59			
670100	BNO. BEBAN BUNGA RAK	3,730,728,972.29			
670110	BNO. SELISIH KAS	2,001.00			
670140	DENDA	118,396.00			
	TOTAL BIAYA	5,338,245,037.13		TOTAL PENDAPATAN	5,176,022,077.16
316100	LABA/RUGI SBLM PAJAK	-162,222,959.97			
720100	PEND PAJAK TANGGUHAN	55,613,574.00			
315400	LABA/RUGI TAHUN BERJALAN	-106,609,385.97			

Mengetahui,



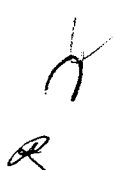
Muhammad Ali
Direksi

KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DANAPOS
ATAU DISINGKAT PT BPR DANAPOS

Pada hari ini, Kamis tanggal delapan Januari dua ribu dua puluh enam (08-01-2026), bertempat di Kantor PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos yang dikenal dengan PT BPR Dana Pos, berkedudukan di Jl. KH Abdullah Bin Nuh No 18-19 Cianjur, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 103, tanggal 25 April 1994 yang dibuat dihadapan Drs. Haji Entjoen Mansoer Wiriatmadja, SH, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor C2-2.768 HT.01.01TH.95 tanggal 21 Februari 1995 yang telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa nomor 35 tanggal 20 Oktober 2003 yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, SH, Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor C27403 HT.01.04.TH.2003 tanggal 14 Nopember 2003, diubah lagi dengan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 41 tanggal 16 juni 2006 yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, SH, Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor C-19079 HT.01.04.TH.2006 tanggal 29 Juni 2006, diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 02 tanggal 05 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Puspa Sri Dewi, SH, Notaris di Cianjur yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-66248.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 September 2008, diubah lagi dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 8 tanggal 14 Oktober 2020 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Pemberitahuan Nomor AHU-AHA.01.03-0397955 tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan ARDIANSYAH, SH,MKn, Notaris di Cianjur, diubah lagi dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 04 tanggal 19 Januari 2022 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Pemberitahuan Nomor AHU-AHA.01.03-004989024 Januari 2022 yang dibuat dihadapan ARDIANSYAH, SH,MKn, Notaris di Cianjur, diubah dengan Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham Nomor 03 tanggal 19 September 2023 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0057872..AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 25 September 2023 yang dibuat dihadapan LILIS AENUN JARIAH, SH,MKn, Notaris di Cianjur. dan diubah dengan Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham Nomor 01 tanggal 02 Mei 2025 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.09-0220358 tanggal 05 Mei 2025 yang dibuat dihadapan LILIS AENUN JARIAH, SH,MKn, Notaris di Cianjur.

Para Pemegang Saham yang hadir terdiri dari :

1. Tuan **RAHMAT**, lahir di Cianjur, pada tanggal satu Juni seribu sembilan ratus enam puluh enam (01-06-1966), partikular, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Sriwijaya Raya No. 38 B, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru. Jakarta Selatan.
 - Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174070106660001.
 - dalam hal ini bertindak selaku pemilik dan pemegang 9.200 (sembilan ribu dua ratus) lembar saham dalam Perseroan.



2. Tuan **HM DADANG RACHMAT, SE, M.Si**, lahir di Padang Panjang, pada tanggal dua puluh tiga Desember seribu sembilan ratus lima puluh tiga (23-12-1953), , Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kalapa Dua Rt. 003 Rw. 003 Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur.

- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3203282312530001.
- dalam hal ini bertindak selaku pemilik dan pemegang 300 (tiga ratus) lembar saham dalam Perseroan.

Bahwa saat ini jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan adalah sebanyak 9.500 (sembilan ribu lima ratus) lembar saham.

Bahwa kami selaku pemilik dan pemegang seluruh saham yang telah ditempatkan Perseroan, dengan ini menyatakan :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan untuk :
 - Direksi menyampaikan Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan : Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama satu tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

Seluruh Pemegang Saham Perseroan, dengan ini mengambil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut :

1. Menyatakan sah Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dan berlaku mengikat sebagai hukum baik ke luar maupun ke dalam Perseroan;
2. Menyetujui Laporan Direksi atas jalannya Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima (31-12-2025) dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima (31-12-2025).

1/2
A

Demikianlah Keputusan Para Pemegang Saham PT BPR Dana Pos ini dibuat dan ditandatangani seluruh Pemegang Saham, bermaterai cukup, pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PEMEGANG SAHAM



RAHMAT

HM DADANG RACHMAT, SE, M.Si



BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIAN PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI CERTIFICATE OF COMPETENCE

64131 1120 6 2107 2024

Dengan ini menyatakan bahwa,
Hereby certify that,

Yayat Suryatna

KEU 005 2107 2024

Telah kompeten pada bidang :
Is competent in the Fields :

Bank Perkreditan Rakyat
Rural Bank

Dengan Kualifikasi / Kompetensi :
With Qualifications / Competencies :

DIREKTUR TINGKAT 1
DIRECTOR LEVEL 1

Sertifikat VI / *Certificate VI*

Sertifikat ini berlaku untuk : 3 (tiga) Tahun
This Certificate is valid for : 3 (three) Years

Jakarta, 30 Desember 2024

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) :
On Behalf of the Indonesian Professional Certification Authority (BNSP) :

Lembaga Sertifikasi Profesi CERTIF
CERTIF Professional Certification Institutions



I Nyoman Yudiarsa

Direktur / *Director*

List of Competency Units

No.	Kode Unit Kompetensi (Code of Competency Units)	Judul Unit Kompetensi (Title of Competency Units)
1.	K.64BPR00.011.1	Merancang Produk/Jasa Layanan dan Program Pemasaran (Designing to the Products / Services and Marketing Programs)
2.	K.64BPR00.017.1	Merencanakan Kebutuhan Likuiditas (Planning to the Liquidity Needs)
3.	K.64BPR00.018.2	Menentukan Suku Bunga Dasar Pemberian Kredit (Determining to the Basic Interest Rate on the Loans)
4.	K.64BPR00.019.1	Menerapkan Tatakelola Perusahaan (Implementing to the Corporate Governance)
5.	K.64BPR00.020.2	Menerapkan Peraturan dan Perundang-undangan Yang Berlaku (Implementing to the Applicable Laws and Regulations)
6.	K.64BPR00.022.1	Menerapkan Manajemen Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, dan Risiko Kepatuhan (Implementing to Credit Risk Management, Operational Risk, Liquidity Risk, and Compliance Risk)
7.	K.64BPR00.024.1	Menerapkan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Implementing to Anti-Money Laundering and the Prevention of Terrorism Financing)
8.	K.64BPR00.028.2	Menerapkan Manajemen Kepegawaian (Implementing to the Personnel Management)
9.	K.64BPR00.029.1	Menerapkan Manajemen Kepemimpinan (Implementing to the Leadership Management)
10.	K.64BPR00.034.1	Melakukan Analisis Keuangan dan Non Keuangan (Conducting to the Financial Analysis and Non-Financial)
11.	K.64BPR00.035.2	Membuat Rencana Bisnis (Creating to the Business Plan)

Pemegang Sertifikat ini dapat menggunakan sebutan **Certified Rural Bank Director (C.R.B.D.)**
The holder of this Certificate may using a degree of Certified Rural Bank Director (C.R.B.D.)



Yayat Suryatna

Tanda tangan pemilik
(Signature of holder)

Jakarta, 30 Desember 2024

Atas Nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
(On Behalf of Indonesian Professional Certification Authority)

Lembaga Sertifikasi Profesi CERTIF
(CERTIF Professional Certification Institutions)



Pranindyo Augusta

Kepala Bagian Sertifikasi
(Head of Certification Department)

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP-33/KO.12/2025

TENTANG

HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN SDR. YAYAT SURYATNA
SELAKU CALON ANGGOTA DIREKSI PT BPR DANAPOS

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan dalam rangka memberikan persetujuan terhadap calon anggota Direksi;
 - b. bahwa berdasarkan penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Sdr. Yayat Suryatna selaku calon anggota Direksi PT BPR Danapos, Sdr. Yayat Suryatna memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi PT BPR Danapos;
 - c. bahwa hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Sdr. Yayat Suryatna selaku calon anggota Direksi PT BPR Danapos, sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);



- b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79/OJK);
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 13/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81/OJK).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN SDR. YAYAT SURYATNA SELAKU CALON ANGGOTA DIREKSI PT BPR DANAPOS.

KESATU : Sdr. Yayat Suryatna selaku calon anggota Direksi PT BPR Danapos dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Direksi PT BPR Danapos.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-240125-162377

- KEDUA : Sdr. Yayat Suryatna selaku calon anggota Direksi PT BPR Danapos dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT BPR Danapos.
- KETIGA : bahwa berdasarkan diktum KESATU dan KEDUA, Sdr. Yayat Suryatna selaku calon anggota Direksi PT BPR Danapos Disetujui untuk menjadi anggota Direksi dan/atau Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT BPR Danapos.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan peninjauan kembali terhadap keputusan ini apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau terdapat informasi yang mengakibatkan Sdr. Yayat Suryatna menjadi tidak memenuhi persyaratan sebagai calon anggota Direksi PT BPR Danapos.

Keputusan Dewan Komisiner ini disampaikan kepada:

- a. Sdr. Yayat Suryatna;
- b. PT BPR Danapos;
- c. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan;
- d. Deputi Komisiner Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas;
- e. Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan;
- f. Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 1 – Kantor OJK Provinsi Jawa Barat;

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-240125-162377

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 24 Januari 2025

a.n. DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN

KEPALA OJK PROVINSI JAWA

BARAT



IMANSYAH

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.





BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIAN PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

64131 1120 6 2131 2024

Dengan ini menyatakan bahwa,
Hereby certify that,

Kenny Rahmat, S.E.

KEU 005 2131 2024

Telah kompeten pada bidang :
Is competent in the Fields :

Bank Perkreditan Rakyat
Rural Bank

Dengan Kualifikasi / Kompetensi :
With Qualifications / Competencies :

KOMISARIS
COMMISSIONER

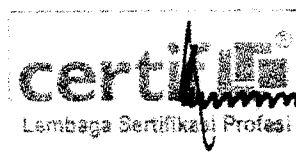
Sertifikat VI / *Certificate VI*

Sertifikat ini berlaku untuk : 3 (tiga) Tahun
This Certificate is valid for : 3 (three) Years

Jakarta, 30 Desember 2024

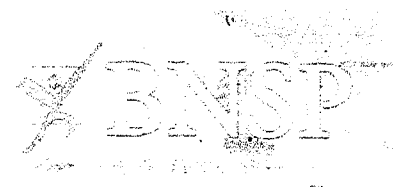
Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) :
On Behalf of the Indonesian Professional Certification Authority (BNSP) :

Lembaga Sertifikasi Profesi CERTIF
CERTIF Professional Certification Institutions



I Nyoman Yudiarsa

Direktur / *Director*



KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP-34/KO.12/2025

TENTANG

HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN SDR. KENNY RAHMAT SELAKU
CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PT BPR DANAPOS

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan dalam rangka memberikan persetujuan terhadap calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris;
 - b. bahwa berdasarkan penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Sdr. Kenny Rahmat selaku calon anggota Dewan Komisaris PT BPR Danapos, Sdr. Kenny Rahmat memenuhi persyaratan sebagai calon anggota Dewan Komisaris PT BPR Danapos;
 - c. bahwa hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Sdr. Kenny Rahmat selaku calon anggota Dewan Komisaris PT BPR Danapos, sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan;

- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);



- b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79/OJK);
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 13/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81/OJK).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN SDR. KENNY RAHMAT SELAKU CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PT BPR DANAPOS.

KESATU : Sdr. Kenny Rahmat selaku calon anggota Dewan Komisaris PT BPR Danapos dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris PT BPR Danapos.

KEDUA : bahwa sebagai akibat sebagaimana pada diktum KESATU, Sdr. Kenny Rahmat selaku calon anggota Dewan Komisaris PT BPR Danapos

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-240125-162609

Disetujui untuk menjadi anggota Dewan Komisaris pada PT BPR Danapos.

KETIGA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan peninjauan kembali terhadap keputusan ini apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau terdapat informasi yang mengakibatkan Sdr. Kenny Rahmat menjadi tidak memenuhi persyaratan sebagai calon anggota Dewan Komisaris PT BPR Danapos.

Keputusan Dewan Komisiner ini disampaikan kepada:

- a. Sdr. Kenny Rahmat;
- b. PT BPR Danapos;
- c. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan;
- d. Deputi Komisiner Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas;
- e. Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan;
- f. Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 1 – Kantor OJK Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 24 Januari 2025

a.n. DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN

KEPALA OJK PROVINSI JAWA

BARAT



IMANSYAH

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Nomor : SR-17/KO.122/2025 30 Januari 2025
Sifat : Segera
Lampiran : Empat Set Berkas
Hal : Penyampaian Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Anggota Dewan Komisaris serta Calon Anggota Direksi dan/atau Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT BPR Danapos

Yth. Direksi
PT BPR DANAPOS
Jl. KH. Abdullah Bin Nuh Nomor 18-19 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat Pamoyanan Cianjur Kab. Cianjur
Jawa Barat

Menunjuk surat Saudara Nomor 151/BPR-DP/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 perihal Penyampaian Dokumen Calon Komisaris dan Direktur PT BPR Danapos, Nomor 159/BPR-DP/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Penyampaian Dokumen Calon Komisaris dan Direktur PT BPR Danapos, dan Nomor 007/BPR-DP/1/2025 tanggal 14 Januari 2025 perihal Penyampaian Kekurangan Dokumen Calon Komisaris dan Calon Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, dengan ini diberitahukan bahwa kami menyetujui pengajuan Sdr. Kenny Rahmat sebagai calon anggota Dewan Komisaris dan Sdr. Yayat Suryatna sebagai calon anggota Direksi dan/atau Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT BPR Danapos.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Salinan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-33/KO.12/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Yayat Suryatna selaku Calon Anggota Direksi PT BPR Danapos
2. Salinan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-34/KO.12/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Kenny Rahmat selaku Calon Anggota Dewan Komisaris PT BPR Danapos.

Selanjutnya dengan disetujuinya Sdr. Kenny Rahmat sebagai calon anggota Dewan Komisaris dan Sdr. Yayat Suryatna sebagai calon anggota Direksi dan/atau Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, kami minta Saudara untuk melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengangkat calon dimaksud paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan OJK.
2. Pengangkatan calon dimaksud wajib dilaporkan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, pada periode laporan terdekat dari tanggal pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi dan/atau Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang ditetapkan dalam RUPS, dengan disertai Risalah RUPS, RUPS Akta Notariil, dan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
3. Menyampaikan bukti *screenshot submit* laporan pengangkatan pada angka 2 tersebut di atas disertai dengan risalah RUPS, bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang dan susunan pengurus terakhir ke alamat *email vunita.teguh@ojk.go.id* dengan surat asli tetap dikirimkan kepada Kantor OJK Provinsi Jawa Barat (Up. Bagian Perizinan).

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Dalam hal RUPS pengangkatan calon Pengurus tersebut tidak dilakukan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, maka persetujuan Otoritas Jasa Keuangan batal dan dinyatakan tidak berlaku.

Apabila di kemudian hari diperoleh data/informasi/dokumen negatif terhadap Sdr. Kenny Rahmat dan Sdr. Yayat Suryatna sehingga dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka persetujuan tersebut di atas akan ditinjau kembali.

Dalam rangka menjaga integritas OJK, kami menyampaikan bahwa seluruh Pegawai OJK dilarang menerima suap dan/atau gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan. Apabila terdapat pegawai OJK yang melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut, dapat dilaporkan melalui *whistleblowing system* OJK (<https://wbs.ojk.go.id/>).

Demikian agar menjadi perhatian Saudara.

Direktur Pengawasan Lembaga Jasa
Keuangan 2



Aulia Fadly

Tembusan:

1. Plt. Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 1
2. Dewan Komisaris PT BPR DANAPOS

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

KP: D.01/RD.1230



OJK-240125-163288

KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DANA POS
ATAU DISINGKAT PT BPR DANA POS

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh delapan bulan April tahun dua ribu dua puluh lima (28-04-2025), bertempat di Kantor PT. Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos yang dikenal dengan PT BPR Dana Pos, berkedudukan di Jl. KH Abdullah Bin Nuh No 18-19 Cianjur, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor Akta Pendirian103, tanggal 25 April 1994 yang dibuat dihadapan Drs. Haji Entjoen Mansoer Wiriatmadja, SH, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor C2-2.768 HT.01.01TH.95 tanggal 21 Februari 1995 yang telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 02 tanggal 05 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Puspa Sri Dewi, SH, Notaris di Cianjur yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-66248.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 September 2008 diubah dengan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 06 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dihadapan ARDIANSYAH, SH,MKn, Notaris di Cianjur, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Nomor AHU-46079.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 02 September 2013, diubah lagi dengan Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham Nomor 02 tanggal 01 Maret 2017 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Pemberitahuan Nomor AHU-AHA.01.03-0098158 tanggal 01 Maret 2017 yang dibuat dihadapan ARDIANSYAH, SH,MKn, Notaris di Cianjur, diubah dengan akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 06 tanggal 13 september 2018 yang disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Pemberitahuan Nomor AHU-AHA.01.03-0243476 yang dibuat dihadapan DAHLIA, SH, Notaris di Jakarta dan diubah lagi dengan Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham Nomor 7 tanggal 18 Oktober 2019 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0084678.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan ARDIANSYAH, SH,MKn, Notaris di Cianjur, dan diubah lagi dengan Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham Nomor 03 tanggal 19 September 2023 yangtelah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0057872..AH.01.02.TAHUN 2013 tanggal 25 September 2023 yang dibuat dihadapan LILIS AENUN JARIAH, SH,MKn, Notaris di Cianjur.

Para Pemegang Saham yang hadir terdiri dari :

1. Tuan **RAHMAT**, lahir di Cianjur, pada tanggal satu Juni seribu sembilan ratus enam puluh enam (01-06-1966), partikulir, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Sriwijaya Raya No. 38 B, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru. Jakarta Selatan.
 - Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174070106660001.
 - dalam hal ini bertindak selaku pemilik dan pemegang 9.200 (sembilan ribu dua ratus) lembar saham dalam Perseroan.

2. Tuan **HM DADANG RACHMAT, SE, M.Si**, lahir di Padang Panjang, pada tanggal dua puluh tiga Desember seribu sembilan ratus lima puluh tiga (23-12-1953), , Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kalapa Dua Rt. 003 Rw. 003 Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur.
 - Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3203282312530001.



- dalam hal ini bertindak selaku pemilik dan pemegang 300 (tiga ratus) lembar saham dalam Perseroan.
- Bahwa saat ini jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan adalah sebanyak 9.500 (sembilan ribu lima ratus) lembar saham.
- Bahwa kami selaku pemilik dan pemegang seluruh saham yang telah ditempatkan Perseroan, dengan ini menyatakan :

Mengangkat Komisaris dan Direktur PT BPR Danapos sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Kenny Rahmat	Komisaris
2	Yayat Suryatna	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatihan

Sehingga susunan kepengurusan PT BPR Danapos menjadi sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	H. Dadang Rachmat	Komisaris Utama
2	Kenny Rahmat	Komisaris
3	Muhammad Ali	Direktur Utama
4	Yayat Suryatna	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatihan

Demikianlah Keputusan Para Pemegang Saham PT BPR Dana Pos ini dibuat dan ditandatangani seluruh Pemegang Saham, bermaterai cukup, pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PEMEGANG SAHAM



RAHMAT

HIM DADANG RACHMAT, SE, M.SI



NOTARIS

LILIS AENUN JARIAH, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-659.AH.02.01 TAHUN 2013, TANGGAL : 04 OKTOBER 2013

SALINAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RUPS LUAR BIASA

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DANA POS

TANGGAL : 02 Mei 2025

NOMOR : 01.-

Jalan Raya Bandung Ruko General Motor
Nomor 10 Rawabango - Cianjur
Hp. : 0812 9075 3695
E-mail : aenunjariah@gmail.com

NOTARIS
LILIS AENUN JARIAH, S.H., M.Kn.

PERNYATAAN KEPUTUSAN

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DANA POS
DISINGKAT PT. BPR DANA POS
TENTANG PERUBAHAN DIREKSI DAN KOMISARIS**

Nomor : 01.-

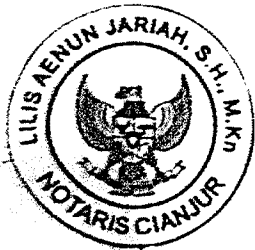
-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 02-05-2025 (dua Mei dua ribu dua puluh lima). -----

-Pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat). --

-Berhadapan dengan saya, **LILIS AENUN JARIAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Cianjur**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- Tuan **MUHAMMAD ALI**, lahir di Jakarta, pada tanggal -- 30-10-1974 (tiga puluh Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Cianjur, Jalan Binawan IX Blok A1 Nomor 8 Belka Residence, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 015, Desa Limbangan Sari, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3203013010740007. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan yang akan disebutkan dibawah ini, demikian berdasarkan kuasa yang telah diberikan kepadanya oleh seluruh pemegang saham sebagaimana termuat dalam Surat Kuasa tertanggal 28-04-2025 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh lima) yang dibuat dibawah tangan bemeterai cukup, aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan selaku demikian sah mewakili untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DANA POS DISINGKAT PT. BPR DANA POS, berkedudukan di



Kabupaten Cianjur, yang Anggaran Dasarnya termuat dalam : -----

-Akta Pendirian tanggal 25-04-1994 (dua puluh lima April seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor 103, yang dibuat dihadapan Doktorandus Haji ENTJOEN MANSOER WIRIAATMADJA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tertanggal 21-02-1995 (dua puluh satu Pebruari seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) Nomor : C2-2.768 HT.01.01.Th.95. Anggaran Dasar mana telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DANA POS Tentang Perubahan Nama Perseroan tanggal -- 19-09-2023 (sembilan belas September dua ribu dua puluh tiga) Nomor 03 yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tertanggal 25-09-2023 (dua puluh lima September dua ribu dua puluh tiga) Nomor : ----- AHU-0057872.AH.01.02.TAHUN 2023, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -- 26-09-2023 (dua puluh enam September dua ribu dua puluh tiga) Nomor 077 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 029657. -----

Selanjutnya dalam akta ini disebut ("Perseroan"). ---

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan identitas yang diberikan. -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini : -----

-Bahwa penghadap yang bertindak dalam kapasitas tersebut diatas, menegaskan bahwa tidak ada akta-akta lain yang

berkenaan dengan perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan berikut persetujuan atau pemberitahuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia selain dari yang telah disebut dan diuraikan diatas. -----

-Bahwa pada tanggal 28-04-2025 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh lima) bertempat di Kantor Perseroan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DANA POS ATAU DISINGYAT PT. BPR DANA POS, dari rapat mana telah dibuat suatu risalah (notulen)nya dibawah tangan, yang bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, untuk selanjutnya akan disebut juga ("**Rapat**"). -----

-Bahwa risalah (notulen) Rapat tersebut benar ditandatangani oleh seluruh para pemegang saham Perseroan. -----

-Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan diwakili sebanyak 9.500 (sembilan ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan sampai saat ini oleh Perseroan, sehingga Rapat tersebut sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan, sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam Anggaran Dasar Perseroan. -----

-Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh : -----

1. Tuan **RAHMAT**, lahir di Cianjur, pada tanggal -----
01-06-1966 (satu Juni seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Sriwijaya Raya Nomor 38 B, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3174070106660001, selaku : -----

a. Pemilik dari 9.200 (sembilan ribu dua ratus) lembar saham dalam Perseroan atau seluruhnya dengan nilai nominal sejumlah Rp. 9.200.000.000, (sembilan milyar dua ratus juta rupiah). -----

2. Tuan Haji **MUHAMMAD DADANG RACHMAT**, Sarjana Ekonomi, **Master of Science**, lahir di Padang Panjang, pada tanggal 23-12-1953 (dua puluh tiga Desember seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Cianjur, Kampung Kalapa Dua, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3203282312530001, selaku : -----
- a. Komisaris Perseroan; dan -----
- b. Pemilik dari 300 (tiga ratus) lembar saham dalam Perseroan atau seluruhnya dengan nilai nominal sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). -----

-Bahwa dalam Rapat tersebut telah mengambil keputusan tentang : -----

1. Pengangkatan sebagai anggota Direksi dan Komisaris Perseroan; -----
2. Perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan. -----

-Bahwa Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas telah diberi kuasa oleh para pemegang saham untuk menyatakan kembali Risalah Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris. -----

-Bahwa Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas bermaksud untuk menyatakan kembali Risalah Rapat tersebut dalam akta ini. -----

-Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan diatas, Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas,

menerangkan bahwa Rapat tersebut telah memutuskan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Menerima dan menyetujui pengangkatan sebagai anggota

Direksi dan Komisaris Perseroan, yaitu : -----

a. Tuan **YAYAT SURYATNA**, lahir di Sumedang, pada tanggal 12-12-1970 (dua belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Cianjur, Bukit Kalimaya Indah Blok AL Jalan Tulip Nomor 1, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 019, Kelurahan/Desa Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3203011212700014, untuk masuk dalam Perseroan serta mengangkat dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan. -----

b. Tuan **KENNY RAHMAT**, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-02-1989 (dua puluh enam Februari seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Lamandau Raya Nomor 8, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3174072602890001, untuk masuk dalam Perseroan serta mengangkat dalam jabatannya sebagai Komisaris Perseroan. -----

2. Menerima dan menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan, sehingga susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut : -----

DIREKSI : -----

- Direktur Utama : Tuan **MUHAMMAD ALI**. -----

- Direktur : Tuan YAYAT SURYATNA. -----

KOMISARIS : -----

- Komisaris Utama : Tuan Haji MUHAMMAD DADANG --
RACHMAT, Sarjana Ekonomi, --
Master of Science. -----

- Komisaris : Tuan KENNY RAHMAT. -----

-Selanjutnya Penghadap tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan memberi kuasa kepada Notaris, dan/atau pegawai Kantor Notaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan ini kepada instansi yang berwenang, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan guna tercapainya maksud tersebut tidak ada yang dikecualikan. -----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka Penghadap yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini Penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi-saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -----

-Akta ini diselesaikan dan ditandatangani pada Pukul 13.30 WIB (tiga belas tiga puluh Waktu Indonesia Barat).

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan diselesaikan di Cianjur, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----



**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0220358

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DANA POS

Kepada Yth.

Notaris LILIS AENUN JARIAH S.H.,
M.KN.

Jalan Raya Bandung Ruko General
Motor No. 10
KABUPATEN CIANJUR PROVINSI
JAWA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 02 Mei 2025 yang dibuat oleh Notaris LILIS AENUN JARIAH S.H., M.KN., berkedudukan di KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DANA POS disingkat PT BPR DANA POS**, berkedudukan di KABUPATEN CIANJUR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 05 Mei 2025.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 05 Mei 2025

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0096596.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 05 Mei 2025

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

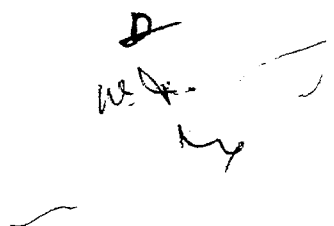
**PERJANJIAN
ANTARA
PT NUSANTARA BONA PASOGIT
DENGAN
PT BPR DANAPOS
TENTANG
UPGRADE APLIKASI NBP SYS 5.0, JASA PEMELIHARAAN (MAINTENANCE) TEKNOLOGI
SISTEM INFORMASI (TSI) TERBATAS PADA APLIKASI NBP SYS 5.0**

Nomor: ~~078~~36/PKS-NBP-BPR-DP/X/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal 17 Oktober 2025, bertempat di Jakarta, telah ditandatangani Perjanjian oleh dan antara:

1. **PT NUSANTARA BONA PASOGIT**, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, yang berkedudukan Jakarta beralamat Jl. Cawang Baru Tengah No. 82 Blok K834, RT.3/RW.10, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13340, dengan akta pendirian tertuang dalam Akta nomor 20 tanggal 10 November 1989 dibuat di hadapan Notaris Edison Sianipar S.H., Notaris di Jakarta, telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor C2-6367.HT.01.01.TH.90, dan terakhir akta nomor 19 tanggal 15 April 2025, dibuat oleh Aurora Wina Muthmainnah, S.H., M.Kn., serta surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.09-0202015 tanggal 23 April 2025, dalam hal ini diwakili oleh **Hendi Apriliyanto**, dalam jabatannya selaku Direktur Utama pada perseroan.
Selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

2. **PT BPR DANAPOS**, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, yang beralamat di Jl. K.H. Abdullah Bin Nuh No. 18-19, Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. 43211, dengan akta pendirian nomor 103, tanggal 25 April 1994 yang dibuat di hadapan Drs. Haji Entjoen Mansoer Wiriadmadja, S.H., Notaris di Jakarta, yang terakhir diubah dengan Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham nomor 01 tanggal 02 Mei 2025 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan nomor AHU-AH.01.09-0220358 tanggal 05 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Lilis Aenun Jariah, S.H., M.Kn., Notaris di Cianjur. Dalam hal ini diwakili oleh **Muhammad ALI** selaku Direktur Utama pada perseroan.
Selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".



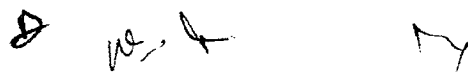
Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **"PARA PIHAK"**. Selanjutnya Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa, sesuai dengan perkembangan sistem dan Teknologi Informasi sesuai dengan Peraturan OJK maka untuk menunjang kecepatan dan kualitas pelayanan pada sistem dan Teknologi Network Banking Program (selanjutnya disebut "NBP Sys"), maka Pihak Pertama melakukan *upgrade* NBP Sys ke Versi 5.0;
- (2) Bahwa untuk menunjang operasional Pihak Kedua dalam menjalankan bisnisnya maka perlu dilakukan *Upgrade* pada NBP Sys yang saat ini dipergunakan oleh Pihak Kedua menjadi terbaru serta perlu dilakukan Pemeliharaan (*Maintenance*) Teknologi Sistem Informasi;

Berdasarkan hal tersebut, Para Pihak sepakat untuk menandatangani perjanjian yaitu "*Upgrade Aplikasi NBP Sys 5.0, Jasa Pemeliharaan (Maintenance) Teknologi Sistem Informasi (TSI) Terbatas Pada Aplikasi NBP Sys 5.0*", untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**" dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan di bawah ini:

PASAL 1 OBJEK PERJANJIAN

- (1) Network Banking Program (NBP Sys) Versi 5.0 merupakan Versi terbaru dari aplikasi NBP Sys dengan penambahan Fitur-fitur berikut:
 - Perubahan pencatatan akuntansi yang sebelumnya menggunakan SAK-ETAP menjadi SAK-EP;
 - Aplikasi perhitungan CKPN;
 - Transfer Laporan Bulanan APOLLO.
- (2) NBP Sys 5.0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipasang pada Sistem milik Pihak Kedua, dimana saat ini Pihak Kedua telah menggunakan Program (NBP Sys) Versi 3.0.
- (3) Aplikasi NBP Sys dibangun dengan menggunakan database *engine* SQL Server 2000 dan *Base Program Ming Power Builder*, yang terdiri dari:
 - a. Modul Setup;
 - b. Modul Customer Service;
 - c. Modul Teller;
 - d. Modul Closing;
 - e. Modul Closing Konsolidasi;
 - f. Modul Tingkat Kesehatan (TKS);
 - g. Modul Management Kredit (MK);



- h. Modul Transfer Laporan Bulanan BPR Konvensional (LBBPRK); dan
 - i. Modul Transfer Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
- (4) Pihak Kedua dalam kedudukannya seperti tersebut di atas, menyatakan bersedia melakukan *Upgrade* terhadap NBP Sys yang saat ini digunakan menjadi NBP Sys Versi 5.0, dan Pihak Pertama menyatakan bersedia untuk memenuhi permintaan Pihak Kedua.

PASAL 2 CAKUPAN PEKERJAAN/JASA

- (1) Adapun ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama dalam rangka *Upgrade* NBP Sys Versi 5.0 adalah sebagai berikut:
- a) *Update* CBS NBP Sys Versi 5.0 yaitu:
 - Modul *Customer*,
 - Modul Perhitungan CKPN
 - Modul *Closing* dan
 - Modul Transfer LBBPRK
 - b) Proses sebagaimana pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan di tempat kedudukan Pihak Kedua.
- (2) Adapun ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama dalam rangka Pemeliharaan (*Maintenance*) Teknologi Sistem Informasi (TSI) adalah sebagai berikut:
- a. Menerima permasalahan sistem melalui surat atau *email*.
 - b. Menindaklanjuti permasalahan sistem dan dapat dilakukan melalui :
 - Surat atau Email.
 - Telepon.
 - Internet (*Remote via Teamviewer atau Ultraviwer*).
 - c. Melakukan *update* terhadap aplikasi CBS NBP Sys 5.0 yang mengharuskan perubahan (Audit OJK) atau perubahan regulasi oleh OJK.
 - d. Melakukan Pemeliharaan (*Maintenance*) terhadap aplikasi:
 - CBS NBP Sys 5.0 (Modul CS , Teller , *Setup*, *Closing*);
 - Transfer Lapbul;
 - Transfer SLIK.
 - e. Membuat laporan atas setiap permasalahan yang telah diselesaikan.
- (3) Melakukan kunjungan langsung ke kantor Pihak Kedua.


me, f -
10

PASAL 3
BIAYA

- (1) Biaya yang harus ditanggung oleh Pihak Kedua untuk *Upgrade* NBP Sys 5.0 adalah sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), ditambah PPN 11%;
- (2) Biaya Jasa Pemeliharaan (*Maintenance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) di atas adalah sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Per bulan belum termasuk PPN sebesar 11% serta akan dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2%;
- (3) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), biaya yang harus dibayarkan Pihak Kedua adalah biaya Tim Pihak Pertama (minimal 2 orang) dalam rangka melaksanakan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yaitu sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang per hari, belum termasuk biaya transportasi dan akomodasi, yang selanjutnya akan dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif Pasal 17, yaitu $5\% \times 50\% \times \text{Rp}500.000,00$ atau sebesar Rp12.500,00 (Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).


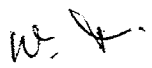

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Pihak Pertama menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan jadwal pekerjaan yang disusun oleh Pihak Pertama yaitu dengan jangka waktu maksimal 10 (Sepuluh) hari kerja terhitung sejak dimulainya kegiatan instalasi, batas waktu ini bisa kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja disesuaikan dengan kondisi dan *support* data dari Pihak Kedua.
- (2) berakhirnya kegiatan instalasi akan dituangkan dalam Berita Acara (BAST) yang ditandatangani oleh Para Pihak, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Jangka waktu Pemeliharaan (*Maintenance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) di atas ini berlaku dan mengikat para pihak untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST)/atau dokumen sejenisnya yang menyatakan selesainya implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (4) Jangka waktu Pemeliharaan (*Maintenance*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak.


Me 4 .
1

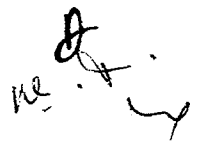
PASAL 5
TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), dibayarkan pada saat penandatanganan Perjanjian.
- (2) Seluruh tagihan akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan cara transfer ke rekening Pihak Pertama sebagai berikut:
 - Nama Bank : Mandiri
 - Cabang : Pasar Rumput
 - No. Rekening : 124-001-061-8594
 - Atas Nama : PT Nusantara Bona Pasogit
- (3) Pembayaran akan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan cara-cara dan dalam jangka waktu sebagai berikut:
 - a) Pihak Pertama akan memberikan tagihan kepada Pihak kedua sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - b) Pihak Kedua akan melakukan pembayaran selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan tagihan dari Pihak Pertama atas pembayaran tagihan pada ayat (1).
 - c) Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, yaitu lebih dari 7 (Tujuh) hari dari tanggal penerimaan *invoice*, maka Pihak Kedua akan dibebankan denda keterlambatan sebesar 1% (Satu Persen) per bulan dari nominal tagihan tertunggak.
- (4) Pihak Kedua dianggap telah melakukan pembayaran dengan dilakukannya transfer dan formulir transfer akan menjadi tanda bukti pembayaran yang sah atas pembayaran yang telah dilakukan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
- (5) PPh yang terutang akan dibayarkan oleh Pihak Pertama, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pihak Pertama wajib menyetorkan PPh yang terutang tersebut ke kas negara, melaporkannya ke Kantor Pajak dan menerbitkan Bukti Pemotongan Pajak kepada Pihak Kedua.
- (6) PPh sebesar 11% dari nilai jual sesuai Pasal 3 ayat (1) akan dibayarkan oleh Pihak Kedua, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pihak Pertama wajib menyetorkan PPh yang terutang tersebut ke kas negara, melaporkannya ke Kantor Pajak dan menerbitkan Faktur Pajak kepada Pihak Kedua.

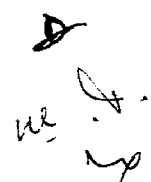
PASAL 6
RISIKO

- (1) Dalam hal terjadinya perubahan Lingkup pekerjaan dan/atau terjadinya keterlambatan penyelesaian instalasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 maka Pihak Pertama akan dikenakan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3);
- (2) Dalam hal terjadi perubahan ruang lingkup bisnis dan perubahan organisasi pada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua berhak untuk mencari Perusahaan penyedia jasa Informasi lainnya (Pihak Ketiga) dan Pihak Pertama wajib untuk membantu Pihak Kedua sebatas pada perpindahan data dan informasi yang berkaitan dengan Pihak Pertama, kepada Pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pihak Kedua secara tertulis kepada Pihak Pertama;
- (3) Dalam hal terjadi perubahan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak pemerintah lainnya yang mengakibatkan ada perubahan terhadap NBP Sys 5.0, maka Pihak Pertama akan segera melakukan *upgrade* aplikasi dan selanjutnya implementasi *upgrade* akan diatur pada addendum perjanjian yang berkaitan langsung dengan *upgrade* tersebut;
- (4) Apabila hasil pekerjaan Pihak Pertama mengalami kerusakan atau musnah seluruhnya akibat kelalaian dari Pihak Pertama sebelum penyerahan kepada Pihak Kedua maka seluruh kerusakan/kerugian tersebut menjadi tanggungan Pihak Pertama;
- (5) Kerusakan Sistem *Hardware*, *Mal-Software* (*Virus*, *Trojan*, *Human Error*, dan sebagainya), serta kehilangan perangkat keras setelah penyerahan pekerjaan (*Levering*) kepada Pihak Kedua maka seluruh kerusakan/ kerugian menjadi tanggungan Pihak Kedua;
- (6) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang harus dibuktikan dan disetujui oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama dibebaskan dari seluruh tanggung jawab atas kerusakan atau musnahnya hasil pekerjaan dan atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan;
- (7) Keadaan memaksa sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (6) adalah bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, perang, huru-hara dan epidemi yang tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu dan nyata-nyata mengakibatkan terjadinya kerusakan pada prestasi dari Pihak Pertama dan atau menghambat Pihak Pertama untuk melakukan prestasi;
- (8) Jika terjadi musibah keadaan memaksa sebagaimana Pasal 6 ayat (7), Pihak Pertama wajib melaporkan secara tertulis kepada Pihak Kedua, selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari setelah tanggal kejadian dan Pihak Kedua akan memberikan perpanjangan waktu kepada Pihak Pertama untuk melakukan prestasi secara menyeluruh;



PASAL 7
KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

- (1) Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan menyebarluaskan kepada pihak mana pun informasi rahasia yang digunakan dalam pelaksanaan perjanjian ini maupun yang berkaitan dengan perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya, kecuali informasi rahasia tersebut harus dibuka oleh karena peraturan perundang-undangan yang berlaku mewajibkannya;
- (2) Apabila salah satu dari para pihak diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan informasi atau keterangan mengenai pihak lainnya, maka pihak tersebut wajib sebelumnya memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dan mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan;
- (3) Setiap dan seluruh informasi yang berkaitan dengan pihak yang memberikan informasi rahasia, baik secara langsung maupun tidak langsung diberikan oleh Pihak Pengungkap kepada penerima informasi rahasia sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini dianggap rahasia, namun tidak termasuk informasi sebagai berikut:
 - a. Sudah diketahui oleh Pihak Pengungkap pada tanggal pengungkapan Informasi Rahasia tersebut oleh Pihak Penerima serta tidak diperoleh atau berasal dari Perusahaan, perusahaan afiliasi atau melalui pihak lainnya yang memiliki kewajiban kerahasiaan;
 - b. Pada tanggal pengungkapan Informasi Rahasia sudah menjadi milik publik atau menjadi bagian milik publik;
 - c. Didapatkan sendiri oleh Pihak Penerima dari pihak ketiga yang menyatakan bahwa pihak ketiga tersebut berhak untuk membuka Informasi Rahasia dimaksud pada waktu diminta oleh Pihak Penerima; atau;
 - d. Telah dikembangkan oleh Pihak Penerima sebelum tanggal pengungkapan Informasi Rahasia.
- (4) Apabila perjanjian ini berakhir, maka pihak yang menerima atau mendapatkan informasi rahasia harus segera mengembalikan data dan dokumen yang mengandung informasi rahasia paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja kepada pihak lainnya;
- (5) Para Pihak bertanggung jawab atas pelanggaran informasi rahasia yang dilakukan olehnya;
- (6) Informasi rahasia tetap harus dijaga oleh para pihak sekalipun perjanjian ini telah berakhir.



PASAL 8
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Pihak Pertama menjamin keamanan dan kerahasiaan data Pihak Kedua terutama hal-hal yang berkaitan langsung dengan Rahasia Bank dan data pribadi nasabah;
- (2) Pihak Pertama menjamin NBP Sys hanya dapat diakses oleh Pihak Kedua, dan tidak memiliki sistem *back door* yang memungkinkan untuk diakses oleh pihak yang tidak berwenang lainnya;
- (3) Pihak Pertama menjamin hal-hal berikut:
 - a) NBP Sys telah didaftarkan di Departemen HAKI atas Merek dan Cipta NBP Sys atas nama PT Nusantara Bona Pasogit;
 - b) NBP Sys merupakan milik Pihak Pertama dan tidak melanggar Hak Kekayaan Intelektual pihak lain;
 - c) NBP Sys tidak mengandung kode rahasia atau pembatasan secara otomatis yang tidak diungkapkan pada perjanjian ini;

PASAL 9
MODIFIKASI APLIKASI

Para Pihak sepakat untuk tidak akan melakukan modifikasi terhadap NBP Sys versi 5.0 tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani Para Pihak.

PASAL 10
KEWAJIBAN

- (1) Pihak Pertama wajib melaporkan setiap kejadian kritis, penyalahgunaan, dan/atau kejahatan dalam penyelenggaraan teknologi informasi yang dapat atau telah mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan dan/atau mengganggu kelangsungan operasional Pihak Kedua;
- (2) Pihak Pertama wajib melakukan *Transfer of Knowledge* kepada Pihak Kedua dengan melakukan pelatihan terhadap SDM Pihak Kedua, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a;
- (3) Pihak Pertama wajib untuk menjaga secara terus menerus keamanan dan kerahasiaan data/informasi Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan perjanjian ini.

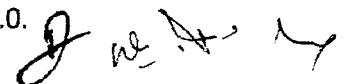


PASAL 11
PEMUTUSAN PERJANJIAN DAN SANKSI

- (1) Pihak Kedua berhak memutuskan perjanjian ini secara sepihak setelah didahului dengan pemberitahuan tertulis selama 7 (Tujuh) hari sebelum pemutusan perjanjian kepada Pihak Pertama, dalam hal Pihak Pertama lalai dan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sesuai dengan jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4.
- (2) Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), maka Pihak Kedua dikenakan sanksi berupa membayar Pihak Pertama sesuai prestasi kerja yang telah diselesaikan dalam proses *upgrade* NBP Sys versi 5.0 oleh Pihak Pertama, ditambah dengan denda sebesar 10% dari nilai yang dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1).
- (3) Apabila Pihak Pertama oleh karena sesuatu hal tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4, dengan alasan-alasan yang tidak dapat diterima oleh Pihak kedua, maka Pihak Pertama dikenakan denda sebesar 1‰ (Satu Permil) dari seluruh nilai perjanjian ini untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari seluruh nilai perjanjian.
- (4) Denda yang dimaksud Pasal 11 ayat (3) tidak dibebankan kepada Pihak Pertama, apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan dikarenakan kelalaian serta keterlambatan penyampaian data oleh Pihak Kedua.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pihak lainnya baik secara perdata maupun secara pidana.

PASAL 12
GARANSI

- (1) Pihak Pertama memberi garansi terhadap NBP Sys versi 5.0, yang di instalasi di Pihak Kedua selama 1 (Satu) bulan, terhitung sejak tanggal penandatanganan Berita Acara penyelesaian instalasi.
- (2) Garansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) tidak berlaku jika kerusakan di sebabkan oleh:
 - a) *Force Majeure* ;
 - b) *Kerusakan Sistem Hardware, Mal-Software (Virus, Trojan, Human Error, dan sebagainya)*, serta kehilangan Perangkat keras ;
 - c) Penambahan atau perubahan (*customize*) modul yang diinginkan oleh Pihak Kedua yang bukan merupakan paket standar NBP Sys versi 5.0.



- (3) Apabila Pihak kedua melakukan tanya jawab via telepon sehubungan dengan NBP Sys versi 5.0 dengan Pihak Pertama, Pihak kedua dapat menghubungi kantor Pihak Pertama dengan nomor (021) 85914968 selama jam kantor, Senin s/d Jumat jam 08:00 WIB s/d 17:00 WIB;
- (4) Jika diperlukan kedatangan Tim Pihak Pertama, maka biaya yang timbul adalah sesuai dengan Pasal 3 ayat (3).

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk semaksimal mungkin akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian melalui musyawarah tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
- (3) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, Para Pihak tetap wajib untuk melaksanakan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian ini.

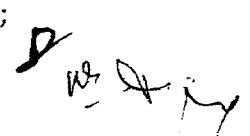
PASAL 14 AUDIT TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI

Pihak Kedua dan Pihak Pertama bersedia untuk membantu memberikan keterangan yang diperlukan oleh tim audit baik yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan atau audit intern Teknologi Sistem Informasi (TSI) atau audit ekstern.

PASAL 15 PENYEDIA JASA TEKNOLOGI INFORMASI

Pihak Pertama memastikan bahwa telah memenuhi persyaratan sebagai penyedia jasa teknologi sesuai dengan ketentuan POJK Nomor: 75/POJK.03/2016 Pasal 17 ayat (1) huruf F:

- (1) Memiliki tenaga ahli yang didukung dengan sertifikat keahlian sesuai dengan keperluan penyelenggaraan Teknologi Informasi;
- (2) Menerapkan prinsip pengendalian Teknologi Informasi secara memadai yang dibuktikan dengan hasil audit yang dilakukan pihak independen;
- (3) Menyediakan akses bagi auditor intern Pihak Kedua, auditor ekstern yang ditunjuk oleh Pihak kedua, dan Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan secara tepat waktu setiap kali dibutuhkan;



- (4) Menyatakan tidak berkeberatan dalam hal Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pihak lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan penyediaan jasa yang diberikan;
- (5) Sebagai pihak terafiliasi, menjaga keamanan seluruh informasi termasuk rahasia bank dan data pribadi nasabah;
- (6) Melaporkan kepada Pihak kedua setiap kejadian kritis yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan dan/atau mengganggu kelangsungan operasional Pihak kedua;
- (7) Menyediakan Rencana Pemulihan Bencana yang teruji dan memadai;
- (8) Bersedia untuk menyepakati kemungkinan penghentian perjanjian kerja sama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian (*Early Termination*) dalam hal perjanjian kerja sama tersebut menyebabkan atau diindikasikan akan menyebabkan kesulitan pelaksanaan tugas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- (9) Memenuhi tingkat layanan sesuai dengan perjanjian tingkat layanan (*Service Level Agreement*) antara para pihak dan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi.

PASAL 16

TINGKAT LAYANAN/*SERVICE LEVEL*

Tingkat Layanan (*Service Level*) dalam pelaksanaan perjanjian ini adalah mengacu sebagaimana pada Tingkat Layanan (*Service Level*) terlampir, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 17

KEPEMILIKAN *SOURCE CODE*

- (1) Pihak Pertama adalah pemilik dari *source code* NBP Sys Versi 5.0, Pihak Kedua hanya diperbolehkan menggunakan NBP Sys versi 5.0 tersebut sesuai dengan tujuan yang disepakati dalam perjanjian ini dan tidak diperkenankan untuk mengubah, menyalin, atau mendistribusikan *source code* tersebut tanpa izin tertulis dari Pihak Pertama.
- (2) Apabila Pihak Pertama dinyatakan pailit oleh undang-undang maka Pihak Kedua wajib diberikan *source code* NBP Sys versi 5.0 atau Versi terbaru (bila ada), setelah mendapat persetujuan dari Pihak Pertama;
- (3) Dalam keadaan pailit, Pihak Pertama **TIDAK WAJIB** menyerahkan (*Source Code*) NBP Sys versi 5.0 atau versi terbaru (bila ada) kepada Pihak Kedua, apabila jangka waktu perjanjian kerja sama ini telah berakhir sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1);

PASAL 18
KETENTUAN PENUTUP


Para Pihak sepakat bahwa hal-hal yang belum atau tidak tercakup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur dan disepakati melalui surat menyurat antar para pihak, yang mana itu semua merupakan tambahan/adendum perjanjian ini dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (Dua), dibubuhi meterai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK PERTAMA
PT NUSANTARA BONA PASOGIT


Hendi Apriliyanto
Direktur Utama

PIHAK KEDUA
PT BPR DANA POS 


Muhammad ALI
Direktur Utama

TINGKAT LAYANAN /SERVICE LEVEL NBP Sys

Tingkat Layanan (*Service Level*) adalah tingkat pelayanan atau kinerja dijanjikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang menggunakan jasa dan layanan dari Pihak Pertama. Tingkat layanan dapat berubah untuk tujuan peningkatan pelayanan yang diterima oleh Pihak Kedua.

1. Layanan

Layanan yang akan disediakan oleh Pihak Pertama adalah layanan yang diminta/diharapkan Pihak Kedua untuk disediakan oleh Pihak Pertama.

2. Kategori / Jenis-Jenis Permasalahan

Pihak Pertama membagi kategori *troubleshooting* dalam 5 (lima) kategori sesuai dengan tingkat kesulitannya dalam penyelesaiannya.

a. Kategori I

Permasalahan yang disebabkan karena *human error*. Terbagi menjadi dua kondisi: kondisi biasa dan kondisi luar biasa yang ditetapkan status kondisinya oleh tim IT *support* setelah melihat kesalahan yang terjadi.

b. Kategori II

Permasalahan karena *bug* program.

c. Kategori III

Permasalahan dan atau penyesuaian yang memerlukan *upgrade system* tindak lanjut dan penanganan lebih lanjut.

d. Kategori IV

Permasalahan yang disebabkan oleh Program/Aplikasi/*Tools* bantu pihak ke 2, atau Program/Aplikasi/*Tools* yang dikembangkan sendiri oleh Pihak Kedua.

e. Kondisi V

Permasalahan yang disebabkan oleh *Force Majeure* baik *Force Majeure* yang terjadi pada Pihak Kedua dan atau yang terjadi pada Pihak Pertama.

3. Dukungan Teknis/ *Technical Support*

- a. Pihak Pertama menyediakan dukungan teknis kepada Pihak Kedua dari satu atau lebih produk dan jasa. Pihak Pertama tidak sepenuhnya menyediakan dukungan/ layanan terhadap *software* dan aplikasi pihak ketiga, atau komponen-komponen dari pihak ketiga dan atau yang dirancang oleh Pihak Kedua sendiri dalam syarat dan ketentuan yang berlaku.
- b. Standar penyelesaian permasalahan
 - 1) Permasalahan Kategori I
Permasalahan yang disebabkan dan termasuk dalam kategori I diselesaikan maksimal lima (5) jam untuk kondisi biasa melalui media *remote/viewer* dan tiga (3) hari untuk kondisi luar biasa melalui media email.
 - 2) Permasalahan Kategori II
Permasalahan yang disebabkan dan termasuk dalam kategori II diselesaikan maksimal lima (5) hari kerja melalui media *remote/viewer* dan atau media email.
 - 3) Permasalahan Kategori III
Permasalahan yang disebabkan dan termasuk dalam kategori III diselesaikan oleh tim maksimal lima (5) hari kerja.
 - 4) Permasalahan Kategori IV
Permasalahan yang disebabkan dan termasuk dalam kategori IV diselesaikan oleh tim maksimal satu (1) bulan.
 - 5) Permasalahan Kategori V
Permasalahan yang disebabkan dan termasuk dalam kategori V akan dilakukan analisa dan akan dilakukan kesepakatan mengenai tindak lanjut penyelesaian/bantuan perbaikan maksimal lima (5) hari sejak diketahui kondisi *Force Majeure*.
- c. Kondisi apabila Pihak Kedua melakukan operasional namun Pihak Pertama libur. Pihak Kedua akan diarahkan untuk berhubungan langsung dengan tim *IT support* yang sudah ditetapkan/ditunjuk.

4. Peningkatan / *Escalation*

Jika Pihak Kedua tidak puas dengan Layanan Pihak Pertama atau jika Pihak Kedua tidak dapat mengatasi masalah teknis dalam ketentuan yang diuraikan dalam tingkat layanan ini, dapat menghubungi Kepala Bagian divisi terkait. Kepala Bagian akan meninjau ulang permasalahan dan kepentingan dari Pihak Kedua dalam jangka waktu maksimal tiga (3) hari kerja untuk dilakukan analisa kebutuhan sesuai permasalahan yang terjadi.

5. Sarana Penunjang Online

Pihak Kedua dapat menghubungi kami mengenai kendala/*troubleshooting* dengan nomor telepon sebagai berikut (021) 85914968 dan/atau email: stasa.lakarta@stora.com atau it@stora.com, email tersebut *online* 24 jam dan memiliki relasi ke semua email pribadi tim IT *support* atau dapat menghubungi *Contact Person* tim IT *support* yang telah disepakati.

6. Ketersediaan dan Kinerja

- a. Silakan hubungi kami dengan penjelasan yang lengkap dan jelas dari permasalahan yang terjadi. Tim IT *support* tersedia pada jam kerja Senin s/d Jumat Pukul 08.00 WIB s/d 17.00 WIB kecuali hari besar/libur nasional.
- b. Diluar kondisi nomor 6 poin a di atas, Pihak Kedua akan diarahkan untuk berhubungan langsung dengan tim IT *support* yang disepakati melalui *Contact Person*.

7. Kepemilikan Data

Data hasil olah program adalah sepenuhnya milik Pihak Kedua sehingga Pihak Kedua wajib menjaga data masing-masing dan kami tidak bertanggung jawab atas kehilangan kerusakan data baik yang disebabkan oleh pihak internal dan eksternal Pihak Kedua.

8. Penyimpanan Data

Lakukan penyimpanan dan *back up* data pada akhir tutup buku harian dengan tiga (3) tingkatan/media.

- a. Lakukan *back up* berkala pada komputer server.
- b. Lakukan *back up* berkala dikomputer lain yang masih satu (1) gedung.
- c. Lakukan *back up* berkala dikomputer lain di luar gedung yang telah disepakati oleh manajemen Pihak Kedua.

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank dimana BPR wajib Menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan, maka berikut kami sampaikan laporannya.

Laporan Keuangan Tahunan ini kami susun sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Entitas Privat (SAK-EP) dan Pedoman Akuntansi Perbankan bagi Bank Perekonomian Rakyat nomor 21/SEOJK.03/2024.

Dalam laporan ini kami sampaikan data-data laporan keuangan posisi 31 Desember 2025 yang disertai dengan uraian / penjelasan.

Demikian laporan keuangan ini kami susun dan telah dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Dana Pos.

Cianjur, 26 Januari 2026



Muhammad Ali

Direktur Utama



Yayat Suryatna

Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI ATAS KEBENARAN ISI
LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : **Muhammad ali**
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor KTP : 3203013010740007
Alamat : Jl. Binawan IX Blok A1 No.8 BELKA Residence
RT/RW. 001/015 Desa Limbangan Sari
Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur

Selaku Direksi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.BPR Dana Pos yang berkedudukan di JL. KH. Abdullah Bin Nuh No. 18-19 Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur , Provinsi Jawa Barat. Sesuai POJK Nomor 15 tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, dengan ini menyatakan bahwa laporan tahunan PT. BPR Dana Pos yang disampaikan melalui Apolo merupakan laporan keuangan yang :

1. Laporan Keuangan Tahunan ini kami susun sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Entitas Privat (SAK-EP) dan Pedoman Akuntansi Perbankan bagi Bank Perekonomian Rakyat nomor 21/SEOJK.03/2024 dan telah dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 08 Januari 2026.
2. Seluruh informasi yang disampaikan dalam laporan tahunan 2025 adalah benar dan sesuai dengan kondisi BPR yang sebenarnya.
3. Pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan tahun 2025 dinilai cukup efektif dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Cianjur, 26 Januari 2026

PT. BPR Dana Pos



Muhammad Ali

Direktur Utama

**SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS dan PERSETUJUAN
ATAS KEBENARAN ISI LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : **H. Dadang Rahmat**
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor KTP : 3203282312530001
Alamat : Kp. Kalapa Dua RT/RW. 003/003 Desa Sindanglaya
Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur.

2. Nama : **Kenny Rahmat**
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor KTP : 3174072602890001
Alamat : Jl. Lamandau Raya No.8 RT/RW. 006/007
Kel/Desa Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

Selaku Dewan Komisaris, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.BPR Dana Pos yang berkedudukan di JL. KH. Abdullah Bin Nuh No. 18-19 Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur , Provinsi Jawa Barat. Sesuai POJK Nomor 15 tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, dengan ini menyatakan bahwa laporan tahunan PT. BPR Dana Pos yang disampaikan melalui Apolo merupakan laporan keuangan yang :

1. Laporan Keuangan Tahunan ini kami susun sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Entitas Privat (SAK-EP) dan Pedoman Akuntansi Perbankan bagi Bank Perekonomian Rakyat nomor 21/SEOJK.03/2024 dan telah dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 08 Januari 2026.
2. Seluruh informasi yang disampaikan dalam laporan tahunan 2025 adalah benar dan sesuai dengan kondisi BPR yang sebenarnya.
3. Pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan tahun 2025 dinilai cukup efektif dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Cianjur, 26 Januari 2026

PT. BPR Dana Pos



H. Dadang Rahmat

Komisaris Utama



Kenny Rahmat

Komisaris

**LAPORAN
TRANSPARANSI PELAKSANAAN
TATA KELOLA BPR**



PT.BPR DANAPOS
JL. KH.Abdullah Bin Nuh No.18-18 Cianjur 43211
Phone : 0263-280588 (hunting) fak 0263-280599

TAHUN 2025

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	JL. KH. ABDULLAH BIN NUH NO. 18-19 CIANJUR 43211
Nomor Telepon	0263 280588
Penjelasan Umum	Penyusunan laporan transparansi pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (transparency) akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya. Dari pengertian tersebut agar pengelolaan usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola (Good Corporate Governance) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip dasar tata kelola dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan Visi, Misi, Rencana Strategis, Pelaksanaan Kebijakan dan langkah-langkah Pengawasan Internal pada seluruh jenjang organisasi. Tata Kelola PT. BPR Dana Pos telah merujuk pada Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat POJK No. 9 Tahun 2024
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	3 (CUKUP BAIK)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	Manajemen BPR telah menerapkan tata kelola perusahaan secara umum dengan cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip-prinsip tata kelola yang dinilai cukup memadai. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola yang bersifat cukup signifikan dan memerlukan perhatian lebih lanjut dari manajemen, degan masih adanya rangkap jabatan

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	NIK : 3203013010740007
	Nama : MUHAMMAD ALI
	Jabatan : DIREKTUR UTAMA
	Tugas dan Tanggung Jawab : Tugas dan tanggungjawab Direksi : Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan BPR, Menyiapkan RBB, Membuat laporan tahunan, Menyiapkan laporan Manajemen, Menyiapkan susunan organisasi, Menjalankan kewajiban lainnya sesuai ketentuan, Bertanggungjawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian perseroan yang disebabkan kelalaian dalam menjalankan tugas kecuali dapat membuktikan tidak terlibat dan telah melakukan tindakan pencegahan, Memperhatikan ketentuan yang berlaku, Memberitahukan kepada Dewan Komisaris mengenai kerjasama yang dilakukan BPR, Meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan, Melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab, itikad baik dan penuh kehati-

	hatian, Melaksanakan tata kelola yang baik, memastikan terpenuhinya SDM yang memadai, Pemisahan tugas dan tanggungjawab tiap unit kerja, menunjuk audit internal, pelaksanaan tindak lanjut temuan audit internal dan hasil pemeriksaan OJK dan otoritas lain, Membuat kebijakan remunerasi untuk PE dan karyawan, Menyiapkan data dan informasi terkait BPR yang akurat, relevan, tepat waktu, Keputusan yang diambil berdasar pada pedoman dan tatib Direksi.
2.	NIK : 3203011212700014
	Nama : YAYAT SURYATNA
	Jabatan : DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN
	Tugas dan Tanggung Jawab : Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan: merumuskan strategi serta mendorong terciptanya budaya kepatuhan, memastikan kegiatan usaha BPR mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku : pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat, pelaksanaan peningkatan literasi dan inklusi keuangan, pelaksanaan sosialisasi ketentuan internal, pemenuhan permintaan data dari OJK serta pemberian saran atas permasalahan dari unit kerja internal.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris: pada tanggal 14 Januari 2025

1. Telah disampaikan kelengkapan berkas calon Direktur dan calon anggota dewan komisaris ke OJK pada tanggal 14 Januari 2025 dengan nomor surat 007/BPR-DP/I/2025.
2. Telah dibuat RUPS pertanggungjawaban atas Laporan Keuangan tahun 2024 yang ditandatangani pada tanggal 06 Januari 2025.
3. Telah dibuat RUPS, Akta Notaris dan pendaftaran ke Kemenkumham, RUPS pengangkatan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Anggota Dewan Komisaris yang ditandatangani tanggal 28 April 2025, Akta notaris nomor 01 tanggal 02 Mei 2025, dan SK dari Kemenkumham nomor AHU-AH.01.09-0220358.
4. –
5. Telah disampaikan surat permohonan perubahan suku bunga dan provisi Pinjaman Channeling dengan nomor surat 059/BPR-DP/V/2025.
6. Telah dibuat produk deposito Back to Back dengan SOP/KRD/013 tanggal 19 Desember 2025 yang dapat dijadikan jaminan pinjaman.
7. Telah ditransfer ke Rekening an Huakanala Hubudi yang mewakili Tim Likuidator QQ PT Asuransi Jiwa Kresna (Dalam Likuidasi) Pada tanggal 02 September 2025 dengan dasar Kesepakatan Perdamaian dengan mediator Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 12 Agustus tahun 2025 .
8. Kaji Ulang penerapan CKPN telah dibuat dan dilaporkan ke OJK tiap semester dengan surat pengantar nomor 019/DIR/BPR/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 dan surat nomor 079/DIR/BPR/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025.
9. –
10. Telah dikinikan secara bertahap pedoman dan SOP yang berlaku di PT. BPR Dana Pos disesuaikan dengan peraturan yang berlaku untuk BPR.
11. Telah diupayakan penagihan serta restrukturisasi kepada debitur yang menunggak.

12. –
13. –
14. Sebagian besar temuan audit internal telah ditindaklanjuti, begitupun dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK sebagian besar telah dilengkapi sesuai komitmen.
15. RBB tahun 2026 telah disampaikan ke OJK pada tanggal 09 Desember 2025.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	NIK : 3203282312530001
	Nama : H. DADANG RACHMAT
	Jabatan : KOMISARIS UTAMA
	Tugas dan Tanggung Jawab : Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk kepentingan BPR. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan MR serta kebijakan strategis. Dalam penyaluran dana kepada pihak terkait agar sesuai ketentuan OJK mengenai BMPK. Mengawasi tugas direksi dan memastikan tindak lanjut hasil pengawasan komisaris. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut temuan AI dan hasil pemeriksaan OJK. Membuat kebijakan dan menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota dewan Komisaris. Membuat laporan adanya pelanggaran dan keadaan yang membahayakan BPR ke OJK. Membuat Pedoman dan Tatib Dewan Komisaris. Wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara optima
2.	NIK : 31740272602890001
	Nama : KENNY RAHMAT
	Jabatan : KOMISARIS
	Tugas dan Tanggung Jawab : Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk kepentingan BPR. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan MR serta kebijakan strategis. Dalam penyaluran dana kepada pihak terkait agar sesuai ketentuan OJK mengenai BMPK. Mengawasi tugas direksi dan memastikan tindak lanjut hasil pengawasan komisaris. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut temuan AI dan hasil pemeriksaan OJK. Membuat kebijakan dan menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota dewan Komisaris. Membuat laporan adanya pelanggaran dan keadaan yang membahayakan BPR ke OJK. Membuat Pedoman dan Tatib Dewan Komisaris. Wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara optima
Rekomendasi kepada Direksi:	
1. Menindaklanjuti pemenuhan Direktur dan anggota dewan Komisaris ke OJK.	

2. Agar segera mengajukan persetujuan RUPS untuk laporan keuangan tahun 2024 yang telah disetujui Dewan Komisaris.
3. Dengan telah keluarnya hasil penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon anggota Dewan Komisaris serta Calon Anggota Agar segera melengkapi RUPS, membuat Akta Notaris dan pengurusan ke Kemenkumham
4. Target Pertumbuhan PT. BPR DanaPos per tanggal 30 April 2025 yang belum tercapai agar menjadi perhatian utama pengurus.
5. Khusus kredit penerusan channeling agar menaikan bunga pinjaman semula 13% menjadi 15%.
6. Dalam penggalangan DPK BPR akan membuat produk simpanan berupa deposito dengan manfaat / keuntungan yang berbeda dibanding produk pesaing.
7. Penyelesaian dana milik PT. Asuransi Jiwa Kresna (Dalam Likuidasi) agar pembayaran dilakukan ke rekening atas nama Tim Likuidator QQ PT. Asuransi Jiwa Kresna (Dalam Likuidasi).
8. Terkait temuan OJK : Agar rangkap jabatan dapat segera diselesaikan sesuai komitmen ke OJK, serta terkait implementasi CKPN agar pengurus terus melakukan kaji ulang untuk pemilihan metode yang akan digunakan.
9. RBB tahun 2026 : Agar melakukan penelitian mendalam untuk rencana kredit channeling P2P Lending, terkait hal tersebut agar melakukan persiapan upgrade Core Banking Sistem (CBS), Agar mencari pendanaan melalui pinjaman antar bank, agar Kembali menyalurkan kredit UMKM, Agar melakukan pemenuhan penambahan karyawan untuk mengurangi rangkap jabatan.
10. Agar Direksi senantiasa melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan pedoman yang berlaku yang senantiasa disesuaikan dengan peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
11. Direksi wajib menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan Operasional dan Bisnis, menindaklanjuti dan melakukan penanganan terhadap kredit bermasalah, memperbaiki ketentuan kredit yang dirasa masih kurang sesuai, menjaga likuiditas dengan baik serta melaksanakan kebijakan strategis PT. BPR Dana Pos dan menjalankan Tata Kelola yang baik sesuai Peraturan OJK dan ketentuan yang berlaku.
12. Terkait Tingkat Kesehatan harus senantiasa menjalankan Tata Kelola dengan baik sehingga dapat memperoleh Tingkat Kesehatan maksimal, memaksimalkan asset kredit untuk memperoleh laba maksimal untuk memperbaiki ROA, BOPO sehingga meningkatkan modal inti PT. BPR Dana Pos
13. Direksi PT. BPR Dana Pos melakukan Tata Kelola dan MR yang baik serta melaksanakan kebijakan strategis PT. BPR Dana Pos sebagaimana ketentuan OJK dan peraturan yang berlaku, Kekurangan PE MR dan Kepatuhan diharapkan dapat dipenuhi sebelum akhir tahun 2026 seiring pertumbuhan bisnis dan pendapatan Perusahaan.
14. Direksi wajib menindaklanjuti temuan Audit dan hasil pemeriksaan OJK sesuai dengan tenggang waktu yang telah disampaikan pada saat exit meeting pemeriksaan tahunan OJK.
15. Agar segera menyampaikan RBB tahun 2026 yang telah disetujui Dewan Komisaris.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

- a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung : Jawab
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung : Jawab
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung : Jawab
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
4.	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan Tanggung : Jawab
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
5.	Komite Lainnya
	Tugas dan Tanggung : Jawab
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Independen Ya/Tdk
				Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunersi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko	Komite Lainnya	
1.									
2.									
3.									

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3203013010740007	MUHAMMAD ALI	-	0	0
2	3203011212700014	YAYAT SURYATNA	-	0	0

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3203282312530001	H. DADANG RACHMAT	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
2	3174072602890001	KENNY RAHMAT	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA

3. Kepemilikan Saham Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3174070106660001	RAHMAT	TIDAK ADA	0	0
2	3203282312530001	H. DADANG RACHMAT	TIDAK ADA	0	0

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
	3203013010740007	MUHAMMAD ALI	-	-	-
	3203011212700014	YAYAT SURYATNA	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	3203282312530001	H. DADANG RACHMAT	-	-	-
2	3174072602890001	KENNY RAHMAT	-	-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3203013010740007	MUHAMMAD ALI	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
2	3203011212700014	YAYAT SURYATNA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3203282312530001	H. DADANG RACHMAT	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
2	3174072602890001	KENNY RAHMAT	TIDAK ADA	TIDAK ADA	ADA

3. Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3174070106660001	RAHMAT	TIDAK ADA	ADA	TIDAK ADA
2	3203282312530001	H. DADANG RACHMAT	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3203013010740007	MUHAMMAD ALI	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
2	3203011212700014	YAYAT SURYATNA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3203282312530001	H.DADANG RACHMAT	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
2	3174072602890001	KENNY RAHMAT	TIDAK ADA	TIDAK ADA	ADA

3. Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3174070106660001	RAHMAT	TIDAK ADA	ADA	TIDAK ADA
2	3203282312530001	H.DADANG RACHMAT	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	257.000.000,-	2	176.000.000,-
2.	Tunjangan	2	14.904.812,-	2	8.582.400,-
3.	Tantiem				
4.	Kompensasi berbasis saham				
5.	Remunersi lainnya				
	Total Remunerasi		271.904.812,-		184.582.400,-
	Jenis Fasilitas Lain				
1.	Perumahan				
2.	Transportasi	1	65.268.000,-		
3.	Asuransi Kesehatan	2	8.840.000,-		
4.	Fasilitas Lainnya				
	Total Fasilitas Lainnya		74.108.000,-		0,-
	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		346.012.812,-		184.582.400,-

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan
	a/b
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,63 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,36 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,50 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,96 : 1

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	20250106	2	Agar segera menindaklanjuti pemenuhan pengurus yaitu Direktur dan anggota Komisaris, Komisaris menyetujui RBB tahun 2025, dan Laporan keuangan tahun 2024 agar segera diajukan untuk mendapat persetujuan dalam RUPS
2.	20250303	2	Dengan telah keluarnya surat SRT-17/KO.122/2025 tanggal 30 Jan 2025 agar Direksi segera melengkapi RUPS, membuat akta notaris tentang perubahan susunan pengurus.
3.	20250526	3	Dengan terpenuhinya pengurus diharapkan BPR dapat lebih maju lagi, Target pertumbuhan seperti yang tercantum dalam RBB tahun 2025 belum menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan agar menjadi perhatian utama pengurus, Penyaluran kredit Channeling agar bunga diupayakan naik dari semula 13% menjadi 15%, Penggalangan DPK agar BPR membuat produk yang dapat memberi keuntungan berbeda, Penyelesaian Transfer dana milik PT. Asuransi kresna (dalam likuidasi) dapat ditransfer hanya dilakukan ke rekening an Tim Likuidator QQ PT. Asuransi Jiwa Kresna (dalam likuidasi).
4.	20251117	3	A. Temuan OJK atas adanya rangkap jabatan, saat ini BPR belum memungkinkan untuk adanya penambahan karyawan, Direksi telah mencabut SK 003/DIR-BPR/III/2024, Pemulihan grade karyawan terdampak SK tersebut belum dapat dipulihkan, Implementasi CKPN telah dilakukan ke sistem namun direksi belum memutuskan metode mana yang akan digunakan. B.RBB 2026 BPR akan mengarap channeling P2P Lending, terkait hal tersebut akan melakukan upgrade CBS, akan bekerjasama dengan koperasi2 penyalur kredit, akan mencari pinjaman Bank, kembali menyalurkan kredit UMKM, akan melakukan penambahan karyawan
5.	20251208	4	Evaluasi kepatuhan terhadap kebijakan/pedoman yang berlaku di BPR. Evaluasi kepatuhan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan MR, Operasional, Likuiditas dan Pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi tersebut. Pengawasan dan evaluasi hasil pertanggungjawaban Direksi terhadap perkembangan BPR. Pengarahan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR. Tindak lanjut audit dan hasil pemeriksaan OJK. Penyampaian RBB BPR tahun 2026.

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	3203282312530001	H. DADANG RAHMAT	5	0	100%
2.	3174072602890001	KENNY RAHMAT	1	0	20%
3.					

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (dalam 1 tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud								
Telah Diselesaikan								
Dalam Proses Peyelesaian								
Belum Diupayakan Penyelesaiannya								
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum								

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	
Dalam Proses Penyelesaian		
Total	1	

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Penerima Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
1	3174070106660001	RAHMAT	PSP	3203013010740007	MUHAMMAD ALI	DIREKTUR UTAMA	TRANSFER	RP12.500.000,-	SEWA RUANG UNTUK GUDANG KEPADA JOSHUA RAHMAT YANG MERUPAKAN ANAK KANDUNG DARI BP. RAHMAT SELAKU PSP PT. BPR DANAPOS

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah (Rp)
1	20250811	SOSIAL	HUT KEMERDEKAAN RI	BENDAHARA ACARA	-	Rp250.000,-
2	20250812	SOSIAL	HUT KEMERDEKAAN RI	BENDAHARA ACARA	-	Rp100.000,-
3	20250814	SOSIAL	HUT KEMERDEKAAN RI	BENDAHARA ACARA	-	Rp100.000,-

Cianjur, 26 Januari 2026
PT. BPR Dana Pos



Muhammad Ali
Direktur Utama



H. Dadang Rachmat
Komisaris Utama